

**LAPORAN TAHUNAN  
PT BPR NEHEMIA  
PERIODE 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kami menyampaikan Laporan Tahunan 2025, yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban Direksi dalam melaksanakan operasional BPR selama satu tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2025 BPR masih tetap berupaya mempertahankan kinerja dengan menjaga pertumbuhan pos-pos inti BPR agar tetap betumbuh dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 pertumbuhan BPR Nehemia masih melambat, selain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, kebijakan manajemen BPR untuk lebih hati-hati dalam menjalankan usaha, intinya pelaksanaan strategi usaha mengacu pada Rencana Bisnis BPR Nehemia.

Mengawali laporan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepercayaan dan kerjasamanya pada PT BPR Nehemia sehingga tercipta suatu jalinan yang saling menguntungkan semua pihak. Kami menyadari bahwa semua yang telah di capai belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, namun kami akan terus berupaya dan berkarya untuk memenuhi harapan tersebut. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengurus dan seluruh karyawan atas kerja samanya dalam upaya ikut mengembangkan PT BPR Nehemia.

Laporan ini di susun berdasarkan laporan keuangan PT BPR Nehemia yang telah diaudit okeh Kantor Akuntan Publik Prof.Dr.H.Tb. Hasanuddin, M. Sc. & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan kami berharap laporan ini dapat menggambarkan seluruh aktivitas operasional bank di tahun 2025, kami sadar bahwa dalam penyajiannya masih banyak kekurangannya.

Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan laporan tahunan ini, semoga BPR Nehemia tetap sehat, tumbuh berkembang dan menghasilkan.

Terima Kasih

Padalarang, 30 April 2026

Dewan Direksi

*PT BPR NEHEMIA*

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.01.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan OJK		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja
						No. SK	Tanggal SK		
1	Edrianto Sitorus	Kab. Bandung Barat	Direktur Utama	19/09/2022	19/09/2027	KEP-14/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	12/04/2027
2	Nimas Ayu Pamungkas	Kab. Bandung Barat	Direktur	19/09/2022	19/09/2027	KEP-1/KR.02/2018	02/01/2018	Ya	12/04/2027
3	Rosi Rostianti	Kab. Bandung Barat	Komisaris Utama	19/09/2022	19/09/2027	KEP-16/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	26/11/2028
4	Pahala Silitonga	Kab. Bandung Barat	Komisaris	19/09/2022	19/09/2027	KEP-15/KR.21/2016	26/02/2016	Ya	26/11/2028

Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi Kepatuhan (Ya/Tidak)	Komisaris Independen (Ya/Tidak)
Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko		
S2	04/07/2019	Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia	Rencana Bisnis Bank	23/11/2021	Perbarindo					Tidak	
D3	09/07/2005	Universitas Padjadjaran	Membangun BPR yang tangguh	17/12/2020	Perbarindo					Ya	
S1	23/02/1994	STIE Pasundan	Produktivitas SDM	28/12/2020	Perbarindo	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat		Ya
SLTA	30/04/1986	SMA Siphahutar	Membangun BPR yang tangguh	17/12/2020	Perbarindo	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat		Ya

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.01.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	Nama Pejabat Eksekutif	Alamat	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat
			Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU dan PPT	Lainnya	
1	Rida Rosyidatul Ummah	Kab. Bandung Barat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Pejabat Eksekutif	Tidak Menjabat	22/04/2024

Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite			
No.	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko
01/BN/DIR/SKPKT/IV/2024	22/04/2024	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat

*PT BPR NEHEMIA*

---

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.02.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: DATA KEPEMILIKAN BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	Nama	Alamat	Jenis	Status pemegang Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan	Ultimate Shareholders
1	Robinson Sitorus	Kota Bandung	Perorangan	PSP	1.520.000.000	76.00	Ya
2	Edrianto Sitorus	Kab. Bandung Barat	Perorangan	Non PSP	480.000.000	24.00	Tidak

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.03.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: RIWAYAT PENDIRIAN BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Informasi</b>	<b>Keterangan</b>
Nomor Akta Pendirian	<b>3</b>
Tgl. Akta Pendirian	19/08/1998
Nomor Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	<b>5</b>
Tgl Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	30/10/2024
Nomor Pengesahan dari Instansi yang berwenang	<b>AHU-0069599.AH.01.02.TAHUN 2024</b>
Tgl Pengesahan dari instansi yang berwenang	30/10/2024
Tanggal Mulai pelaksanaan kegiatan usaha	29/03/1990
Bidang Usaha sesuai Anggaran dasar	Bank Perkreditan Rakyat, mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tempat Kedudukan	Jl. Raya Padalarang No. 546 RT/RW 005/012 Kelurahan Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat 40553

PT. BPR Nehemia merupakan suatu lembaga usaha yang bergerak dalam jasa perbankan, didirikan dengan akta Notaris tanggal 19 Agustus 1989 Nomor 3, di buat di hadapan Notaris Iwan Halimi, di Kabupaten Bandung, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tanggal 21 Februari 1990, No. C2-903.HT.01.01.TH.90 dan telah diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tanggal 03 April 1990 No. 27 tambahan berita Negara No. 1258/1990. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Ivana Natalia, SH. Nomor Akta 5 tanggal 30 Oktober 2024, AHU-0069599.AH.01.02.TAHUN 2024, mengenai perubahan Nomenklatur PT. Bank Perkreditan Rakyat Nehemia menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Nehemia.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.03.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2024</b>

<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah</b>
Pendapatan Operasional	<b>2.515.298.100</b>
Beban Operasional	<b>2.483.781.397</b>
Pendapatan Nonoperasional	-
Beban Nonoperasional	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum pajak	<b>31.516.704</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	2.995.960
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<b>28.520.744</b>

*PT BPR NEHEMIA*

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.03.03</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Aset Produktif	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank Lain	11.223.646.983	-	-	-	-	11.223.646.983
Kredit Yang diberikan						
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank – Pihak terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank – Pihak Tidak Terkait	7.916.794.504	28.344.505	143.391.377	72.111.350	1.956.776.270	10.117.418.006
<b>Jumlah Aset Produktif</b>	<b>19.140.441.487</b>	<b>28.344.505</b>	<b>143.391.377</b>	<b>72.111.350</b>	<b>1.956.776.270</b>	<b>21.341.064.989</b>
Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)					
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	127,52					
Rasio Cadangan terhadap PPKA	95,71					
Non Performing Loan (NPL) Neto	3,57					
Non Performing Loan (NPL) Gross	21,47					
Return on Assets (ROA)	0,20					
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	98,52					
Net Interest Margin (NIM)	9,45					
Loan to Deposit Ratio (LDR)	108,67					
Cash Ratio	12,75					

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.03.04</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PENJELASAN MENGENAI NON PERFORMING LOAN (NPL)</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Kategori</b>	<b>Uraian</b>
Penyebab Utama	Mayoritas rekening bermasalah merupakan debitur lama, jadi selama tahun 2025 relatif tidak ada penambahan kredit macet. Besaran NPL yang tinggi terpengaruh oleh menurunnya outstanding pinjaman yang diberikan, maka nominal penyebut dalam perhitungan rasio NPL semakin kecil dan hasilnya rasio NPL menjadi besar.
Langkah Penyelesaian	untuk memperbaiki rasio NPL yang relatif besar maka pelemparan kredit berkualitas baik harus selalu ditingkatkan, selain itu bpr akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan kredit bermasalah antara lain : Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan analis kredit melalui pendidikan dan pelatihan; mematuhi kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan; melakukan pemantauan kredit; melakukan penanganan kredit bermasalah dengan prioritas bobotnya, tetap selktif atas setiap pengajuan kredit.

Outstanding kredit Nett yang dimiliki BPR sampai dengan akhir Desember 2025 setelah dikurangi administrasi dan provisi kredit sebesar Rp. 10.117.418,- ribu, jumlah tersebut terbagi atas beberapa kolektibilitas atau kualitas kredit, antara lain : lancar 78,25%, dalam perhatian khusus 0,28%, kurang lancar 1,42%, diragukan 0,95% dan macet 19,34%. Berdasarkan data tersebut diatas, kaitannya dengan prosentase NPL BPR menunjukkan adanya peningkatan NPL Gross dan penurunan NPL Net apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun 2025, NPL Gross BPR sebesar 21,47 % dan NPL Net BPR sebesar 3,57 %. BPR akan terus berupaya untuk menurunkan prosentase NPL dengan memperbaiki kualitas aktiva produktif yang dimiliki.

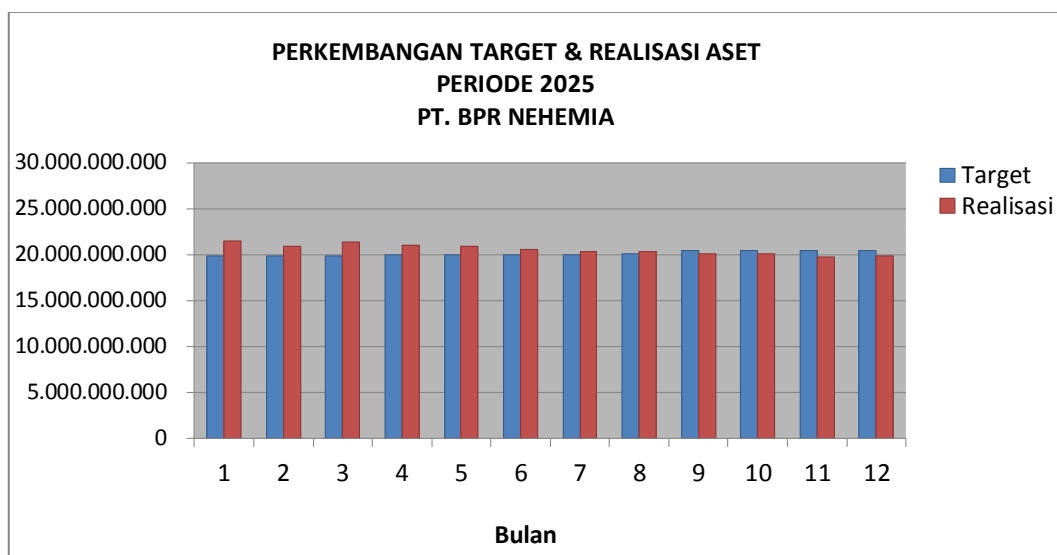
<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.03.05</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Perkembangan usaha BPR masih mengalami perlambatan, akan tetapi pencapaian target BPR sebagian besar terealisasi namun relatif kecil. Melemahnya kemampuan daya saing BPR dalam ekspansi produk khususnya produk kredit memberikan dampak signifikan pada perkembangan usaha BPR, ketidak mampuan BPR untuk bersaing dalam menghadapi dampak kondisi eksternal dan persaingan yang sangat ketat merupakan faktor dominan, adapun tingkat suku bunga dan biaya-biaya serta prosedur kredit masih bersaing dan wajar.

#### **1. Perkembangan Aset**

Pertumbuhan aset BPR tahun 2025 mencerminkan tren fluktuasi, hal ini tercermin dari turun naiknya saldo aset setiap bulannya sepanjang tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional BPR. Saldo aset Desember 2025 sebesar Rp. 19.811.242,- ribu atau sekitar 95,84 % dari target yang direncanakan, dimana target yang di rencanakan adalah sebesar Rp. 20.456.878,- ribu, begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 1,27 %, total aset tahun sebelumnya sebesar Rp. 120.065.357,- ribu

Pertumbuhan aset BPR belum memberikan nilai positif terhadap aspek rentabilitas BPR, hal ini tercermin dari pencapaian komposisi rasio ROA, ROE dan BOPO masih dibawah target yang direncanakan, meningkatnya ekspansi produk BPR belum memberikan dampak positif terhadap kinerja BPR. Lebih lengkap tentang perkembangan aset nampak pada gambar di bawah ini.



## 2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pengembangan SDM BPR

### a. Penghimpunan Dana

Sampai dengan akhir tahun 2025 dana pihak ketiga yang berhasil di himpun BPR sebesar Rp. 9.847.946,- ribu, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 11,83 %, saldo Dana Pihak Ketiga tahun sebelumnya sebesar Rp. 11.169.365,- ribu. Apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, pencapaian target Dana Pihak Ketiga sekitar 86,27 %, dimana target yang direncanakan adalah sebesar 11.415574,- ribu. Penghimpunan dana tersebut bersumber dari simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito dan kewajiban segera. Berikut Kami informasikan dari masing-masing sumber dana dimaksud sebagai berikut :

- 1) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (tabungan) sebesar Rp. 1.325.638,- ribu, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 10,89 %, begitupun apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (tabungan) tidak terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 99,61 %, suku bunga tabungan sampai dengan akhir 2025 sebesar 1,00%, sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Direksi No. SKEP : 01/DIR/TAB/XII/2020 Tentang Ketentuan Umum Tabungan, berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020.

- 2) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui deposito berjangka sebesar Rp. 7.985.000 ,- Ribu, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 11,88 %, demikian juga apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (deposito) tidak terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 85,02 %, suku bunga yang diberikan BPR adalah bunga counter rate, selama tahun berjalan telah mengalami beberapa perubahan tingkat suku bunga, bunga terakhir berkisar antara 2,25% sampai dengan 4,50%, jangka waktu penyimpanan terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, sesuai dengan keadaan pasar dan kebutuhan likuiditas bank, minimal penempatan Rp. 8 juta, atas permintaan nasabah penambahan suku bunga akan diberikan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Direksi PT BPR Nehemia No. SKEP : 01/BN/DIR/DEP/II/2026 Tentang Penetapan Suku Bunga Deposito, berlaku sejak tanggal 01 Februari 2024.
- 3) Penghimpunan dana pihak ketiga melalui Kewajiban Segera sebesar Rp. 537.308,- ribu, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sekitar 25,67 %, demikian juga apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penghimpunan dana pihak ketiga melalui simpanan (deposito) tidak terealisasi, dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 692.286,- ribu dengan pencapaian target sekitar 77,61 %.

**b. Penyaluran Dana**

Penyaluran dana BPR terdiri atas Penempatan Pada Bank Lain (PBL) dan Pinjaman yang Diberikan. Masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda namun memiliki risiko dan tujuan yang sama. Perkembangan dari masing-masing produk tersebut akan Kami informasikan sebagai berikut :

- 1) Penyaluran dana melalui penempatan pada bank lain sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 11.223.647,- ribu jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 19,30 % dari tahun sebelumnya,

demikian juga apabila dilihat dari target yang direncanakan BPR, penyaluran dana melalui penempatan pada bank lain tidak terealisasi, dengan pencapaian target sekitar 89,08 %. Jumlah tersebut tersebar di beberapa Bank Umum dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, namun demikian kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas BPR masih terjaga dengan baik.

- 2) Outstanding kredit Gross BPR sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 10.169.065,- ribu jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 28,54 %, hal ini disebabkan adanya peningkatan ekspansi kredit, disamping realisasi pinjaman yang diberikan lebih besar dari angsuran kredit yang diberikan, jumlah tersebut melebihi target yang direncanakan, dimana pencapaian target sekitar 104,80 %, target yang direncanakan sebesar 9.703.403,- ribu. Pertumbuhan BPR Nehemia mulai menunjukkan adanya perkembangan. Namun demikian kemampuan BPR untuk bersaing dikomunitas perlu terus ditingkatkan. Formula strategi dan kebijakan BPR telah disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagai acuan BPR dalam menjalankan usaha, dengan tetap mengutamakan tingkat kehati-hatian.

Dilihat dari target ekspansi kredit yang direncanakan BPR tahun 2025, maka pencapaian target Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp. 8.242.600,- ribu atau sekitar 74,26 %, dengan rata-rata plafond sebesar Rp. 27.567,- ribu, jumlah tersebut meliputi pinjaman baru sebesar Rp. 2.175.500,- ribu dengan rata-rata plafond Rp. 22.661,- ribu, dan Roll Over (RO) sebesar Rp. 6.067.100,- ribu dengan rata-rata plafond Rp. 29.887,- ribu, dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa, penyaluran dana lebih dominan dalam bentuk Roll Over (RO) yakni sekitar 73,61 %, sedangkan kredit baru sekitar 26,39 %, adapun target yang direncanakan sebesar Rp. 11.100.000,- ribu terdiri atas dua jenis penggunaan kredit, yakni modal kerja sebesar Rp. 4.401.500,- ribu dan konsumtif sebesar Rp. 3.841.100,- dengan pencapaian target masing-masing sebesar 104,80 % dan 55,67 %.

**c. Pengembangan SDM BPR**

Kewajiban BPR menyediakan dan merealisasikan pengembangan kualitas SDM untuk mendukung peningkatan kompensasi kerja SDM yang ditetapkan paling sedikit 5 % dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, anggaran pelatihan dan pendidikan yang dicadangkan BPR sampai tahun 2025, masih dapat mengcover kebutuhan biaya dalam hal pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM BPR, dalam pelaksanaannya dilalukan baik dilingkungan intern BPR yang diikuti oleh seluruh pegawai BPR diluar staf umum, maupun yang diselenggarakan oleh pihak ekstern, baik secara online maupun offline, sesuai dengan kebutuhan BPR dalam rangka meningkatkan potensi karyawan, agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan dan produktivitas usaha BPR.

**3. Kondisi Keuangan Utama**

**a. Aspek Permodalan.**

Sampai dengan akhir tahun 2025 Aspek permodalan apabila dilihat dari rasio CAR mencapai 127,52 %, aspek ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 3,52 %, dan melebihi target yang direncanakan sekitar 21,92 %, . Jumlah rasio CAR tahun sebelumnya dan target yang direncanakan masing-masing sebesar 123,18 % dan 121,92 %. Kondisi tersebut menunjukkan likuiditas BPR terjaga.

**b. Aspek Kualitas Aktiva**

Aspek Kualitas Aktiva yang dimiliki BPR apabila dilihat dari rasio NPL gross mencapai 21,47 %, aspek ini meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 1,32 % begitupun jika dilihat dari target yang direncanakan, prosentase tersebut meningkat sebesar 24,10 %. Pencapaian prosentase NPL tahun lalu dan target BPR tahun 2025 masing-masing sebesar 21,19 % dan 17,30 %. Dalam hal ini NPL BPR masih tergolong tinggi, upaya penurunan NPL yang dilakukan BPR masih relatif kecil, belum memberikan hasil yang diharapkan.

**c. Aspek Rentabilitas**

Perolehan laba BPR sampai dengan akhir tahun 2025 dilihat dari komposisi rasio rentabilitas yang pengukurannya melalui rasio ROA dan BOPO, masing masing sebesar 0,20 % dan 98,52 %. adapun komponen rentabilitas tahun sebelumnya masing-masing sebesar 0,16 % dan 98,75 %, dengan demikian kedua rasio tersebut menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, Apabila dilihat dari target BPR, target yang direncanakan masing-masing sebesar 0,81 % dan 93,88 %, dengan demikian pencapaian target aspek rentabilitas yang direncanakan tidak terealisasi. Pencapaian target masing-masing rasio sekitar 24,69 % dan 104,94 %. Kondisi tersebut di atas memberikan gambaran bahwa kemampuan BPR dalam menghasilkan laba belum optimal.

**d. Aspek Likuiditas**

Aspek likuiditas yang dimiliki BPR sampai dengan akhir tahun 2025 yang pengukurannya dilihat dari Cash Rasio dan LDR, masing-masing mencapai 12,75 % dan 108,67 %, adapun komponen likuiditas tahun sebelumnya masing-masing sebesar 10,18 % dan 41,79 %, dengan demikian menunjukkan adanya peningkatan Cash Rasio sebesar 25,25 % dan rasio LDR sebesar 160,04 %, apabila dilihat dari pencapaian target yang direncanakan BPR, maka pencapaian target aspek likuiditas masing-masing sebesar 136,66 % dan 215,96 % dari target BPR, dimana target yang direncanakan BPR masing-masing sebesar 9,33 % dan 50,32 %. Meningkatnya Cash Rasio, dikarenakan meningkatnya saldo pos penempatan pada bank Lain (PBL) dalam bentuk tabungan yang digunakan untuk ekspansi kredit. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan Loan To Deposit Ratio (LDR) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**4. Realisasi Jangka Pendek (bulan) dan jangka Panjang (tahun)**

Dalam merealisasikan rencana kerja BPR, manajemen telah melakukan langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut :

- a. Target aset akhir tahun 2025 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang mencerminkan kondisi pencapaian aset yang

berfluktuasi, pencapaian aset pada semester pertama cukup stabil, dimana pencapaian aset berada di atas target yang direncanakan, namun memasuki pertengahan semester dua pencapaian aset berada di bawah target yang direncanakan hal ini disebabkan adanya penarikan simpanan deposito nasabah disamping peningkatan NPL yang mengharuskan BPR melakukan pembentukan CKPN lebih besar, data aset dapat kami informasikan sebagai berikut :

- 1) Pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 102,17 %, dari target BPR, berkisar antara 96,37 % sampai dengan 108,32 %, dalam hal ini target tersealisasi.
  - 2) Pencapaian target jangka panjang mencapai 96,84 % dari target BPR atau sebesar Rp. 19.811.242,- ribu. dalam hal ini target tidak tersealisasi
- b. Target pembentukan cadangan sekunder dalam bentuk penempatan dana pada bank lain akhir tahun 2025 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek maupun jangka panjang dapat kami informasikan sebagai berikut :
- 1) Pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 101,74 %, dari target BPR, berkisar antara 89,08 % sampai dengan 108,29 %, dalam hal ini target tersealisasi.
  - 2) Pencapaian target jangka panjang mencapai 89,08 % dari target BPR atau sebesar Rp. 11.223.647,- ribu. dalam hal ini target tidak tersealisasi
- c. Target pinjaman yang diberikan akhir tahun 2025 apabila dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang masing-masing terealisasi, dimana pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 100,18 %, dari target BPR, berkisar antara 95,58 % sampai dengan 105,64 % sedangkan jangka panjang mencapai 104,80 % dari target BPR atau sebesar Rp. 10.169.065,- ribu,
- d. Target penghimpunan dana pihak ke tiga akhir tahun 2025 dalam bentuk simpanan dan kewajiban segera, sementara pinjaman yang diterima saat ini tidak menjadi sumber target penghimpunan dana pihak ke tiga. Apabila

dilihat dari pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang atas simpanan dan kewajiban segera dapat Kami informasikan sebagai berikut :

- 1) Simpanan tidak terealisasi, tercermin dari pencapaian target jangka pendek rata-rata sebesar 86,83 %, dari target BPR, berkisar antara 86,50 % sampai dengan 102,21 %, sedangkan jangka panjang mencapai 86,83 % dari target BPR atau sebesar Rp. 9.310.638,- ribu.
- 2) Kewajiban segera, untuk pencapaian target dan jangka pendek sebagian tidak terealisasi, rata-rata sebesar 101,78 %, dari target BPR, berkisar antara 69,23 % sampai dengan 207,18 %, sedangkan jangka panjang mencapai 77,61 % dari target BPR atau sebesar Rp. 537.308,- ribu.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.04.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

## **I. Kebijakan Manajemen**

Kebijakan manajemen dalam hal pengelolaan dan pengembangan operasional bank selama tahun 2025, yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pengembangan karyawan (SDM) BPR adalah sebagai berikut :

### **A. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi BPR tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana setiap bagian dari organisasi telah dilengkapi dengan deskripsi tugas kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kekosongan jabatan dalam struktur organisasi, diantaranya Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Kepatuhan dan manajemen risiko begitu pula dengan Kepala Marketing dan marketing, adapun Pejabat Eksekutif APU pula dengan Kepala Marketing dan marketing, hal ini tetap akan menjadi perhatian BPR dalam pemenuhannya yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Pejabat Eksekutif satuan Pengawas Internal (SPI) tahun sebelumnya telah terpenuhi kini mengalami kekosongan kembali pasca yang bersangkutan mengundurkan diri. (Bagan struktur organisasi terlampir).

### **B. Penghimpunan dana**

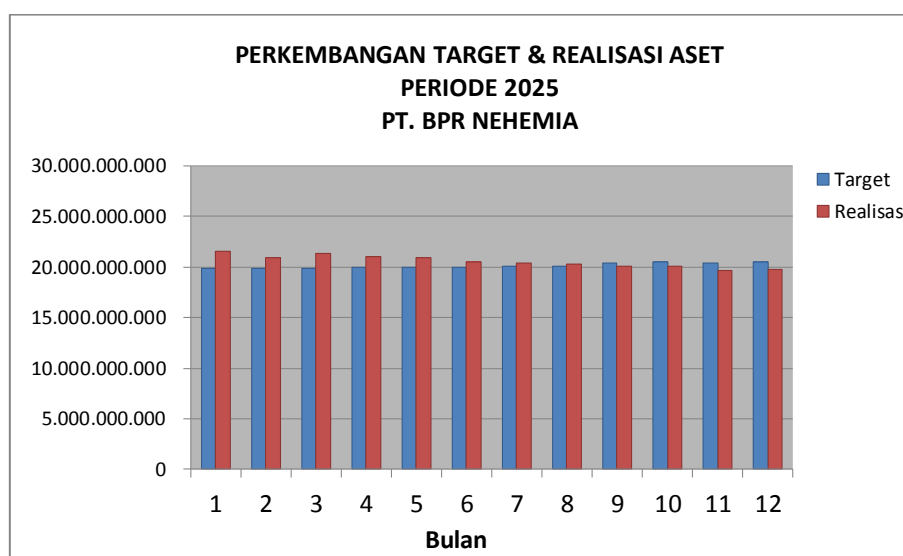
Penghimpunan dana BPR bersumber dari masyarakat dan bank lain dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) serta kewajiban segera, adapun pinjaman yang diterima saat ini tidak menjadi pangsa pasar DPK BPR. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2025, tidak terealisasi dimana pencapaian target yang di rencanakan sebesar 86,83 %, namun demikian BPR berupaya untuk terus meningkatkan penghimpunan dana pihak ke tiga guna meningkatkan aset BPR yang memberikan efek positif terhadap pengaturan likuiditas yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap penyaluran dana. Untuk jalannya operasional, BPR Selalu mengevaluasi kembali pelaksanaan Prosedur dan kebijakan penghimpunan dana pihak ketiga, dan apabila diperlukan Direksi

memberikan arahan kepada bagian terkait agar dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan aturan yang telah ditentukan. Secara umum penghimpunan dana pihak ke tiga dapat kami uraikan sebagai berikut :

**1. Simpanan :**

- a. Pemberian layanan terhadap deposan dan penabung telah mengikuti Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. BPR NEHEMIA.
- b. BPR mewajibkan pelaksanaan prosedur APU & PPT khusus bagi penyimpan dana di atas Rp. 100 juta tunai atau mencurigakan dan melaporkannya secara berkala kepada Otoritas Jasa keuangan
- c. Bunga atas simpanan pihak ke tiga seperti deposito berjangka dan tabungan telah sesuai dengan ketentuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada setiap laporannya, bunga tabungan sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 1 %, dimana bunga tabungan selalu di bawah bunga deposito berjangka dan bila terjadi perubahan tanpa memberitahukan penabung namun demikian perubahan tersebut selalu diumumkan dipapan pengumuman, adapun bunga Deposito berkisar antara 2,25 % sampai dengan 4,50 %, atas permintaan nasabah terhadap penambahan suku bunga deposito akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

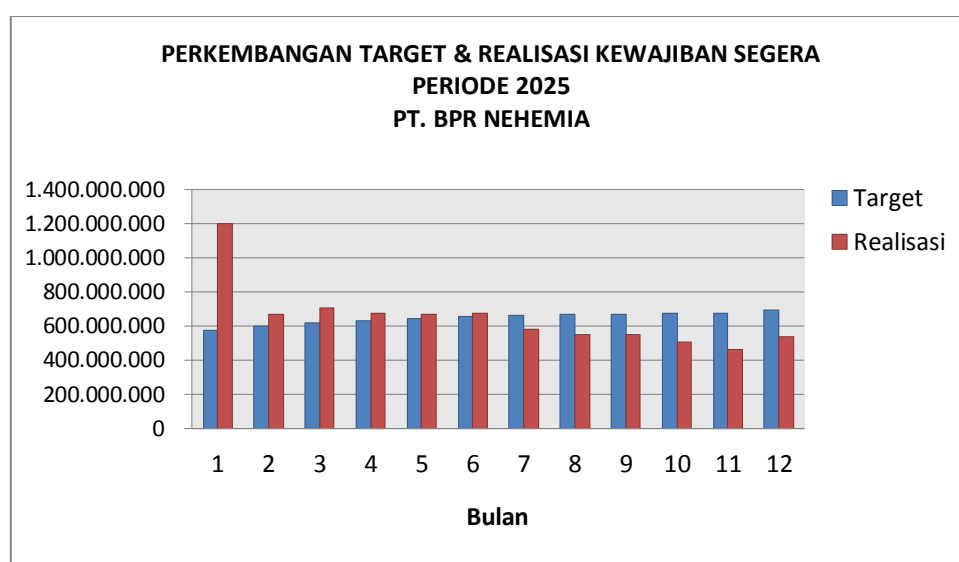
Lebih lengkap tentang perkembangan simpanan BPR nampak pada gambar di bawah ini.



## 2. Kewajiban Segera

Merupakan sumber dana lainnya dari penghimpunan dana pihak ketiga BPR, yang sifatnya hanya sementara/titipan, karena pos ini merupakan kewajiban BPR yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera di bayar.

Lebih lengkap tentang perkembangan simpanan BPR nampak pada gambar di bawah ini.

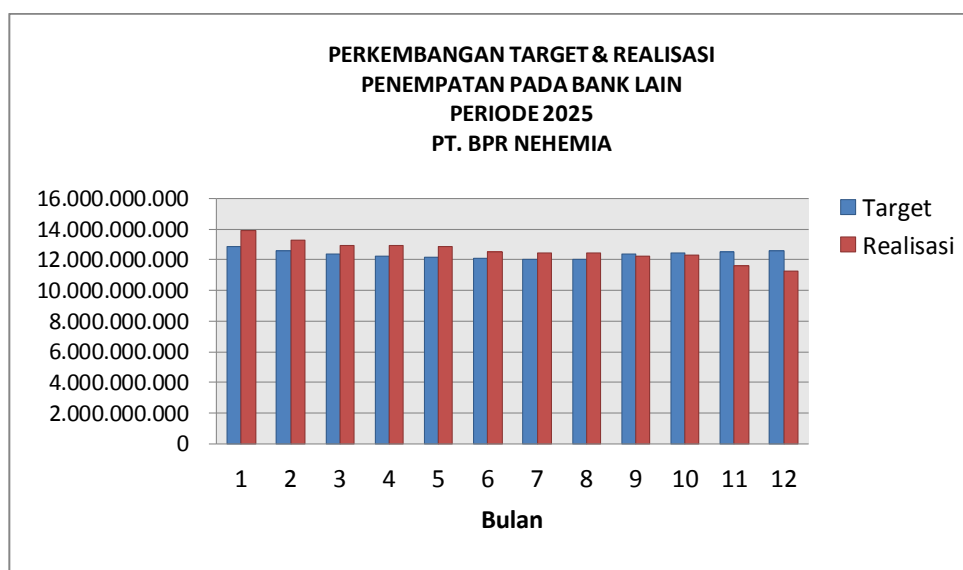
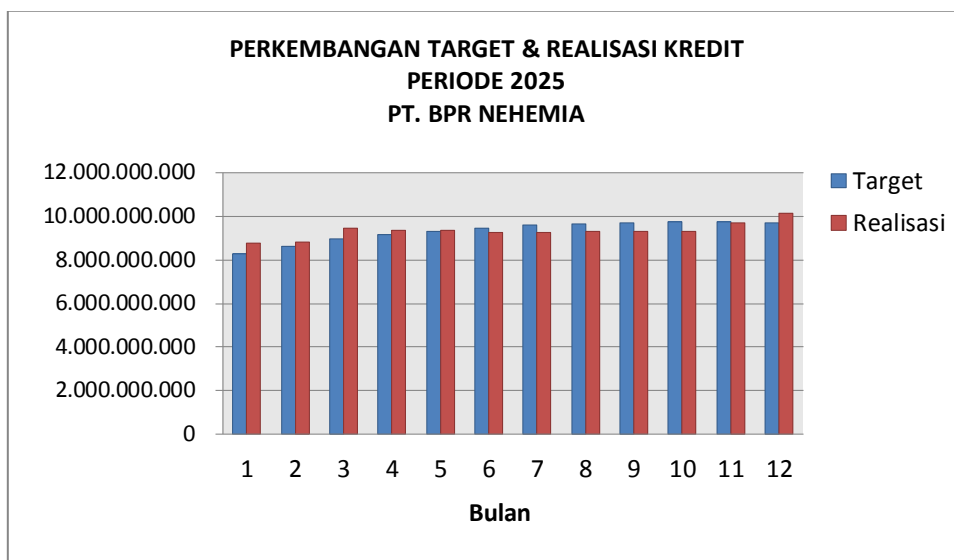


## C. Penyaluran dana

1. Pemberian layanan terhadap penyaluran dana selalu mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di BPR NEHEMIA.
2. Dalam pemberian kredit, BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terutama yang berkaitan dengan pengendalian atas rasio Cash Rasio (CR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Loan to Deposit Rasio (LDR) yang besarnya sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian kredit dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank, mulai dari pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan kredit, sampai kredit lunas. Dalam hal ini prinsip tepat waktu dan tepat jumlah menjadi acuan kerja BPR guna menjaga kualitas aktiva produktif BPR

4. Upaya pemantauan jalannya operasional, BPR selalu mengevaluasi kembali pelaksanaan Prosedur dan kebijakan penyaluran dana dan operasional administrasi kredit.

Lebih lengkap tentang perkembangan penyaliran dana BPR dalam bentuk Kredit dan Penempatan Pada Bank Lain, nampak pada gambar di bawah ini.



#### D. Pengembangan karyawan (SDM)

Pengembangan karyawan merupakan serangkaian proses strategis yang dilakukan oleh BPR untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan

kompetansi karyawan dengan tujuan meningkatkan kinerja individu dan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dimaksud dalam hal :

1. Meningkatkan produktivitas
2. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja
3. Mengurangi tingkat turnover
4. Mengiapkan karyawan imtuk posisi yang lebih tinggi
5. Mengisi kesenjangan keterampilan

Pengembangan karyawan dilakukan BPR melalui kegiatan yang bersifat rutin, seperti pemenuhan kebutuhan karyawan, pendidikan dan pelatihan, melakukan pengkajian organisasi, pengelolaan komunikasi pegawai, pengelolaan gaji dan tunjangan serta kesejahteraan pegawai, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pertumbuhan usaha BPR.

#### **E. Kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha**

Dalam hal kerjasama antar bank atau lembaga lain yang dilakukan BPR adalah dalam bentuk :

1. Penempatan pada bank lain (PBL)  
Merupakan penempatan sementara dana bank berupa tabungan, deposito berjangka dan giro, agar dana tetap produktif sebelum digunakan untuk pengembangan operasional BPR.
2. Pelayanan kepada nasabah BPR  
Merupakan upaya BPR untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah BPR dalam bertransaksi.
3. Pinjaman yang diterima dari bank lain  
Fasilitas ini merupakan komponen dari penghimpunan dana pihak ke tiga BPR, akan tetapi saat ini BPR tidak menggunakannya mengingat likuiditas BPR masih dapat memenuhi kebutuhan perkembangan operasional BPR.
4. Kerjasama dengan lembaga lain  
Sampai dengan akhir tahun 2025 kerjasama BPR dengan salah satu Dealer Motor Honda Amarta Sayap Merah (Amarta motor) yang berkedudukan di Jl. Moch Roha No. 136 Bandung, dimana BPR sebagai

pemberi pinjaman dengan jaminan kendaraan menggunakan pola perikatan guna kepemilikan kendaraan bermotor.

#### **F. Jaringan kerja dan mitra usaha**

Sampai dengan akhir tahun 2025, selain dengan salah satu Dealer Motor Honda Amarta Sayap Merah (Amarta motor), BPR belum melakukan penambahan mitra usaha atau wilayah kerja yang baru, hal ini dimaksudkan agar BPR dapat mengoptimalkan pengembangan dan monitoring usaha di wilayah kerja bank yang sudah ada. wilayah kerja PT. BPR Nehemia meliputi wilayah kab. Bandung barat, Kab. Bandung, Cimahi, Cianjur, Purwakarta, sukabumi dan sekitar perbatasan wilayah Kabupaten, adapun mitra usaha PT. BPR NEHEMIA terdiri atas pegawai baik swasta maupun pemerintah dan umum.

#### **G. Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus dan antar Pemilik dengan Pengurus BPR**

Ahubungan dengan kepemilikan dan susunan pengurus, dapat Kami informasikan sebagai berikut :

1. Pemilik saham BPR satu sama lain memiliki hubungan keluarga.
2. Pengurus BPR satu sama lain tidak ada keterkaitan keluarga.
3. Direktur Utama BPR merupakan salah satu Pemilik Saham BPR.

#### **H. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Dalam RUPS BPR telah diatur mengenai prosedur penetapan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan penetapan dan besaran remunerasi bagi Direksi diputuskan oleh Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, kewenangan ini telah dituangkan dalam Risalah Rapat Pemegang Saham BPR.

#### **I. Transaksi yang berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa**

Dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional BPR, dalam pelaksanaannya BPR melakukan kerjasama

dengan beberapa pihak, baik pihak ketiga lainnya maupun pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa, perlakuan atas kerjasama tersebut diberlakukan sama, dimana BPR selalu melakukan pembandingan untuk menetapkan biaya atas setiap transaksi yang akan dilakukan. disamping itu untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR, khususnya transaksi yang memiliki hubungan istimewa, maka pihak yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut mengambil keputusan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Good Corporate Governance (GCG)

#### **J. Kebijakan Akuntansi BPR**

Kebijakan Akuntansi BPR berpedoman pada SAK-EP (standar akuntansi keuangan - entitas privat) tentang akuntansi perbankan dan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku umum.

#### **K. Reklasifikasi pos laporan keuangan**

BPR tidak melakukan proses reklasifikasi pada pos laporan keuangan, adapun jika terjadi kesalahan akun transaksi maka dilakukan ayat jurnal penyesuaian atau koreksi antar pos dalam laporan keuangan.

#### **L. Pengelolaan dan pengembangan operasional bank**

1. BPR memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu pengelolaan dan pengembangan SDM. Sistem operasional BPR yang digunakan merupakan implementasi core banking system, yang mana dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.
2. Sebagian penyediaan aktiva tetap sebagai sarana pendukung operasional dilakukan melalui operating leasing (sewa).
3. Implementasi penghimpunan dan penyaluran dana, telah dilakukan upaya-upaya peningkatan hasil produk yang dimiliki BPR, akan tetapi penurunan ekspansi produk BPR masih dirasakan sampai saat ini. Berikut langkah-langkah yang dilakukan BPR untuk memperlancar aktivitas operasional dalam memasarkan dan menghasilkan produk antara lain :

- a. Segmentasi pasar khususnya menengah ke bawah, dengan target lokasi pertokoan, perumahan, pabrik-pabrik, instansi-instansi yang berada di wilayah kerja BPR.
- b. Penetapan besaran suku bunga kredit sesuai dengan harga pasar, sedangkan untuk suku bunga simpanan sesuai dengan likuiditas bank.
- c. Layanan yang diberikan untuk menerima setoran/angsuran kredit, penyetoran deposito dan tabungan dapat dilakukan melalui counter BPR langsung atau rekening BPR yang ada di bank umum, sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan melalui counter BPR langsung.
- d. Promosi produk telah dilakukan melalui penyebaran brosur dan konten-konten yang dimuat dalam berbagai platform media sosial secara sekaligus (WhatsApp, Instagram, facebook) dengan pilihan Keyword atau topik yang sesuai dengan situasi dan kondisi internal maupun eksternal, juga dilakukan melalui media personal selling (penjualan langsung/jemput bola), penyebaran brosur, masih tetap dilakukan, sedangkan media mass selling (harian umum media lokal) bersifat optional.
- e. Peningkatan kinerja, meliputi persiapan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, kekurangan modal, menanggulangi kerugian operasional dan lainnya, dilakukan BPR sesuai dengan rencana Bisnis BPR, antara lain :
  - 1) Persiapan dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah diawali dengan penetapan kebijakan kredit yang tepat, selanjutnya dilakukan pengawasan kredit melalui monitoring dan evaluasi, meliputi :
    - a) On Desk Monitoring, merupakan pengawasan kredit yang dilakukan secara administratif, terhadap laporan-laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ketiga.
    - b) On Site Monitoring, merupakan kegiatan pengawasan kredit yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada nasabah, hal ini dilakukan dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari hasil on desk monitoring.

- c) Auditing, merupakan pengawasan dan evaluasi terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat sesuai ketentuan.
  - 2) Dalam hal permodalan BPR masih dapat mengcover likuiditas BPR, dimana CAR BPR akhir tahun 2025 sebesar 127,52 %, modal inti BPR sebesar Rp. 9.477.334,- ribu, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan otoritas.
  - 3) Upaya BPR dalam hal menanggulangi kerugian operasional dilakukan dengan cara menjaga kondisi aktiva produktif BPR agar tetap tumbuh dan berkembang, serta menekan tingkat NPL agar tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, upaya tersebut dapat dilakukan BPR tercermin dari adanya peningkatan outstanding kredit BPR walaupun prosentase NPL meningkat dari tahun sebelumnya,
  - f. Pembukaan kantor cabang maupun kantor lain dibawah kantor cabang, belum menjadi rencana BPR, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan BPR dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya kemampuan BPR untuk bersaing di komunitas serta kesediaan SDM dan Sistem Informasi BPR.
- 4. Dana operasional BPR, diperoleh dari beberapa sumber, antara lain :
    - a. Laba ditahan.
    - b. Laba tahun berjalan
    - c. Cadangan umum
    - d. Dana pihak ke tiga (tabungan, deposito berjangka dan kewajiban segera).
  - 5. Penggunaan dana secara berurutan dipergunakan untuk :
    - a. Ekspansi kredit.
    - b. Pemenuhan kewajiban yang telah jatuh tempo.
    - c. Penempatan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan, Deposito maupun giro.
  - 6. Rencana Bisnis BPR yang telah disusun oleh manajemen menjadi alat pengendali setiap akhir bulan atau tindakan operasional oleh Dewan Direksi.

7. Rencana Bisnis BPR yang telah disusun oleh manajemen dievaluasi tingkat deviasinya antara rencana dengan realisasi oleh Dewan direksi dan dewan Komisaris.
8. Tindak lanjut hasil temuan OJK tahun 2025, sesuai dengan komitmen, Pola penyelesaian atas tindak lanjut hasil temuan OJK dilakukan dengan cara mendistribusikan ke setiap bagian terkait hasil temuan, selanjutnya dilakukan pengontrolan sehingga penyampaian hasil tindak lanjut temuan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen, dan apabila ada kendala segera dicari solusinya.  
Pemenuhan tindak lanjut hasil temuan OJK sebagian besar telah diselesaikan, adapun hasil temuan pemeriksaan umum OJK, yang belum dapat ditindak lanjuti segera akan tindak lanjuti dan hasilnya disampaikan kepada OJK.

## **II. Strategi Manajemen**

Mengacu pada rencana bisnis BPR, langkah-langkah penerapan strategi manajemen BPR Bertolak dari visi dan misi BPR yang merupakan pandangan strategis dalam pencapaian jangka panjang dan global, maka sesuai dengan rencana strategis yang di dasarkan pada hasil analisis SWOT bahwa tingkat efektivitas yang dilakukan manajemen BPR sebagai berikut :

### **A. Strength (Kekuatan) dengan Opportunity (peluang)**

#### **1. Penghimpunan Dana**

- a. Memperluas segmentasi pasar deposito dan penabung, di wilayah kerja BPR.
- b. Membina pola kerjasama yang sudah terjalin dengan berbagai instansi baik swasta maupun Pemerintah serta pemuka masyarakat untuk tetap menjadi mitra penyimpan dana
- c. Selalu melakukan penyesuaian tingkat bunga deposito dan tabungan dengan pesaing, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan LPS.
- d. Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi funding sehingga BPR lebih dikenal masyarakat pengguna jasa perbankan. Saat ini dilakukan BPR melalui media sosial yang dimiliki.

- f. Melakukan evaluasi atas produk Funding yang dipasarkan, menyangkut produk, harga, tempat maupun promosi.

## **2. Penyaluran dana**

- a. Inovasi produk kredit untuk meningkatkan minat pengguna jasa perbankan, dalam upaya meningkatkan ekspansi kredit.
- b. Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik swasta maupun negeri serta pemuka masyarakat untuk menjadi mitra peminjam dana.
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi produk lending sehingga BPR lebih dikenal masyarakat pengguna jasa perbankan.
- d. Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
- e. Melakukan evaluasi atas produk lending yang dipasarkan, menyangkut produk, harga, tempat maupun promosi.

## **3. Pengembangan Karyawan (SDM)**

- a. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga bagian yang terkait mampu meningkatkan wawasan/pengetahuannya.
- b. Perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan di bagian-bagian yang memerlukan penambahan karyawan.
- c. Melakukan pengembangan organisasi pemasaran dalam hal ini mediator yang berkaitan dengan pencapaian target lending belum sepenuhnya dapat dilakukan.

## **B. Strength (Kekuatan) dengan Threat (ancaman)**

### **1. Penghimpunan dana**

- a. Telah melakukan penyesuaian tingkat suku bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing, namun tetap sesuai dengan ketentuan penjaminan dari LPS.
- b. Promosi produk funding melalui media promosi penjualan antara lain Media Sosial Instagram dan WhatsApp serta penyebaran brosur.

## **2. Penyaluran dana**

- a. Telah dilakukan evaluasi persyaratan kredit sehingga lebih cepat, tepat dan akurat.
- b. Melakukan pengembangan dan evaluasi jenis produk kredit melalui modifikasi produk yang telah dimiliki BPR sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Memperbaiki dan mereview persyaratan dan prosedur pemberian kredit yang dapat menghambat pelayanan.
- d. Peningkatan promosi produk lending, melalui media promosi produk penjualan antara lain : Media Sosial Instagram dan WhatsApp serta penyebaran brosur dan jemput bola dengan berbagai manfaat dan jenis kredit yang disalurkan BPR.

## **3. Pengembangan kompetensi karyawan**

- a. Untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, kreatifitas dan produktifitas SDM, BPR mengadakan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk pegawai maupun pengurus, yang mana lembaga penyelenggara bersumber dari pihak intern maupun ekstern, sesuai dengan kebutuhan BPR, kegiatan yang melibatkan pihak eksteran diselenggarakan oleh lembaga pelatihan dan pendidikan serta pengembangan SDM baik secara online melalui webinar dan talkshow maupun offline.
- b. Penyesuaian gaji atau tunjangan karyawan yang diberikan kepada para pegawai minimal Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) KBB tahun 2025.
- c. Memberikan sarana dan prasana memperbaiki dan mereview persyaratan dan prosedur penghimpunan maupun penyaluran dana yang dapat memperlambat proses pelayanan.

## **C. Weakness (kelemahan) dengan Opportunity (peluang)**

### **1. Penghimpunan dana**

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat penyimpan dana, sehingga ada keseimbangan antara nasabah dengan deposan, tidak terfokus hanya pada bunga deposito yang tinggi, kondisi simpanan BPR menunjukkan bahwa jumlah nominal deposito lebih besar dari

jumlah nominal tabungan akan tetapi jumlah rekening penabung lebih besar dari jumlah rekening deposan.

- b. Melakukan pengembangan tabungan dan deposito.
- c. Melakukan promosi simpanan melalui promosi penjualan antara lain : Media Sosial serta penyebaran brosur.
- d. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Penyaluran dana**

- a. Melakukan pengevaluasian dan perbaikan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta persyaratannya.
- b. Melakukan pengembangan organisasi pemasaran yang berkaitan dengan pencapaian target lending yang sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan sebagian besar atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

## **3. Pengembangan karyawan**

- a. Melakukan perekrutan tenaga *Front Office*, *Back Office* dan *Teller*, serta mutasi karyawan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja yang disebabkan pengunduran diri karyawan.
- b. Menindaklanjuti dan merespon serta perbaikan atas temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

## **D. Weakness (kelemahan) dengan Threat (ancaman)**

1. Menambah karyawan sesuai kebutuhan dan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan
2. Belum terealisasi pemenuhan kekurangan struktur organisasi BPR secara keseluruhan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan yang lebih unggul dari pesaing.
4. Memperbaharui dan memperbaiki persyaratan kredit dan prosedur pemberian kredit yang dapat memperlambat pelayanan dan mempercepat proses pemberian kredit

### **III. Manajemen Risiko**

Identifikasi dan pengendalian risiko sebagaimana telah di atur dalam POJK No. 13/POJK/03/2015 telah memacu kesadaran BPR akan perlunya manajemen risiko. Dengan adanya Empat Pilar Manajemen Resiko yakni pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, dapat dijadikan sebagai acuan BPR dalam pengambilan langkah-langkah pengendalian risiko. Melihat dari Modal Inti yang dimiliki BPR sampai dengan akhir tahun 2025, Sedikitnya ada 4 jenis risiko yang mendapat perhatian khusus BPR sebagaimana di atur dalam POJK No. 3/POJK.03/2022 tahun 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, antara lain :

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Likuiditas

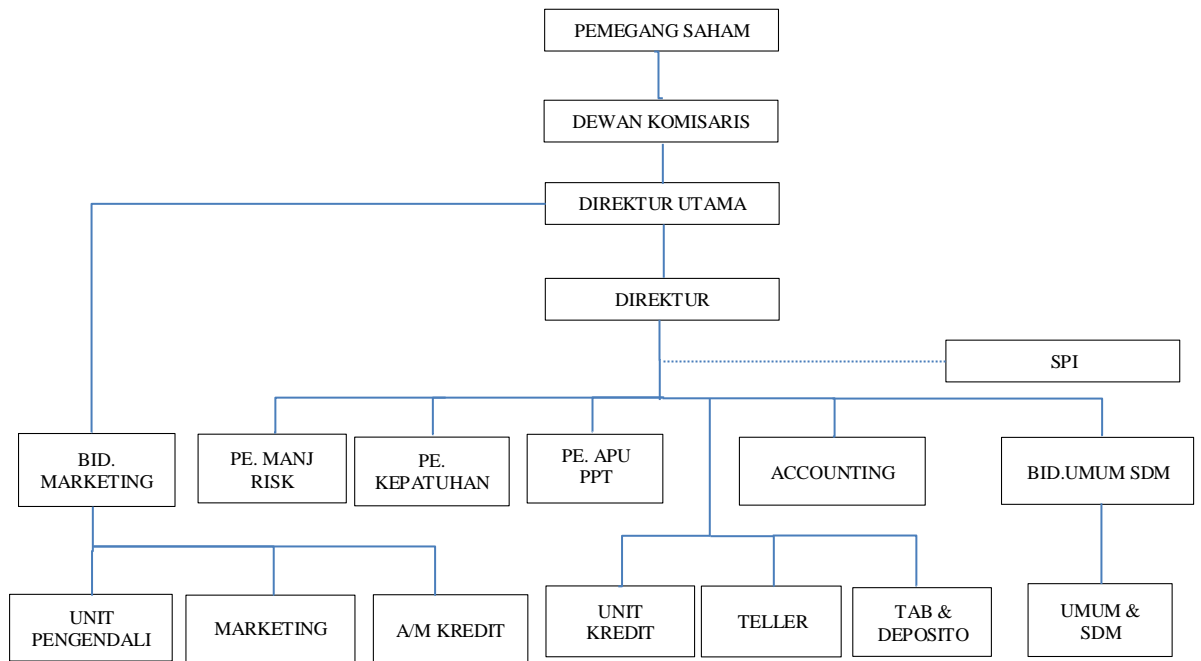
Penerapan dasar yang dilakukan manajemen di lingkungan intern BPR dalam menyikapi hal tersebut di atas, yaitu dengan memberikan arahan-arahan rutinitas kepada seluruh bagian khususnya bagian lending dan funding yang bertujuan untuk memacu motivasi dan evaluasi kerja serta kendala yang dihadapi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko yang akan dihadapi oleh setiap bagian.

Berkaitan dengan uraian tertsebut di atas, untuk menjaga kelangsungan hidup BPR, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian risiko antara lain:

1. Menekan biaya investasi dan operasional
2. Menghindari risiko yang tidak terkendali
3. Menghilangkan pemborosan
4. Meraih dan meningkatkan peluang
5. Meningkatkan share holder bank.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: STRUKTUR ORGANISASI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

**Struktur Organisasi  
BPR Nehemia**



<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: BIDANG USAHA</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Kategori Kegiatan Usaha</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Nama Produk</b>	<b>Uraian</b>
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan	Tabungan Harian
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Deposito	Deposito Berjangka, dengan pilihan jangka waktu bervariasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan
Penyaluran Dana	Produk Dasar	Kredit	Kredit dengan jenis penggunaan modal kerja, konsumtif atau investasi

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.03</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: TEKNOLOGI INFORMASI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Sampai dengan tahun 2025, Sistem Informasi / CBS (Core Banking System) BPR masih menggunakan MIBAS (Micro Integrated Banking Sistem) yang dikembangkan oleh Penyedia Jasa Teknologi POLARIS, BPR juga masih menggunakan aplikasi ANSEL untuk bagian-bagian tertentu.

CBS yang dipakai belum sempurna (MIBAS) masih dalam pengembangan. Dalam Rencana Bisnis, BPR belum berencana melakukan penyempurnaan teknologi Informasi yang dimiliki, namun BPR tetap berupaya agar teknologi yang dimiliki saat ini di optimalkan penggunaannya.

Untuk keamanan Sistem Informasi, setiap karyawan yang berhubungan dengan data Bank memiliki username dan passwordnya masing-masing. Setiap bagian mempunyai porsi menu yang berbeda-beda tergantung jobdesk nya. Untuk mitigasi Risiko, terdapat Otorisasi berjenjang yang berkaitan dengan limit transaksi di setiap bagian.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.04</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Perkembangan dan target pasar PT. BPR NEHEMIA menitik beratkan pada kemampuan bank dalam menjaga likuiditas yang cukup, agar bank tetap dapat berkembang serta dapat memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut Kami informasikan data perkembangan dan target pasar tahun 2025 antara lain :

#### A. Penghimpunan Dana

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BPR yakni dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) dan kewajiban segera. Target penghimpunan dana pihak ke tiga sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp 11.415.574,- ribu, adapun target yang tercapai adalah sebesar Rp. 9.847.946,- ribu atau sekitar 86,27 %, begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 11,83 %. Hal ini disebabkan adanya penurunan simpanan beku dari ekspansi kredit.

Lebih lengkapnya berikut kami informasikan kondisi penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan akhir Desember 2025 pada table di bawah ini.

PT. BPR NEHEMIA  
TARGET DAN REALISASI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KE TIGA  
PERIODE DESEMBER 2025  
(dalam ribuan rupiah)

JENIS SUMBER DANA	31-Des-24	RENCANA dan REALISASI			
		RENCANA		REALISASI	
		IDR	GROWT %	IDR	GROWT %
<b>Total Simpanan</b>	10.448.415	10.723.288	2,63%	9.310.638	86,83%
Tabungan	1.387.415	1.330.888	-4,07%	1.325.638	99,61%
Deposito	9.061.000	9.392.400	3,66%	7.985.000	85,02%
<b>Total Pinjaman yang diterima</b>	0	0	0,00%	0	0,00%
Pinjaman yang diterima	0	0	0,00%	0	0,00%
<b>Total Kewajiban Segera</b>	720.950	692.286	-3,98%	720.950	77,61%
Kewajiban Segera	720.950	692.286	-3,98%	720.950	77,61%
Jumlah	11.169.365	11.415.574	103,98%	9.847.946	105,84%

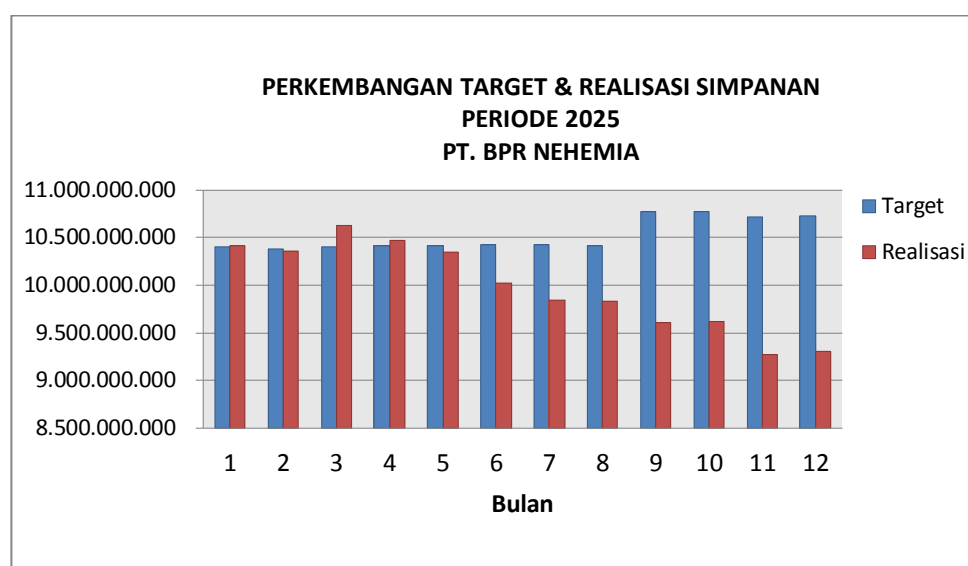
\* 31 Desember 2024 merupakan tahun dasar

Berikut Kami informasikan perkembangan masing-masing sumber dana pihak ketiga yang dapat BPR himpun selama periode 2025 secara lebih terperinci antara target dan realisasi antara lain :

## 1. Simpanan

Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BPR yakni dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito berjangka) sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 9.310.636,- ribu terdiri atas tabungan sebesar Rp. 1.325.638,- dan deposito berjangka sebesar Rp. 7.985.000,- ribu, jumlah tersebut berada di bawah target yang direncanakan, dimana pencapaian target sebesar 86,83 %, sementara target yang direncanakan sebesar Rp. 10.723.288,- terdiri atas tabungan sebesar Rp. 1.330.888,- dan deposito berjangka sebesar Rp. 9.392.400,- ribu. Begitupun Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,89 %

Lebih lengkap tentang perkembangan simpanan nampak pada gambar di bawah ini.

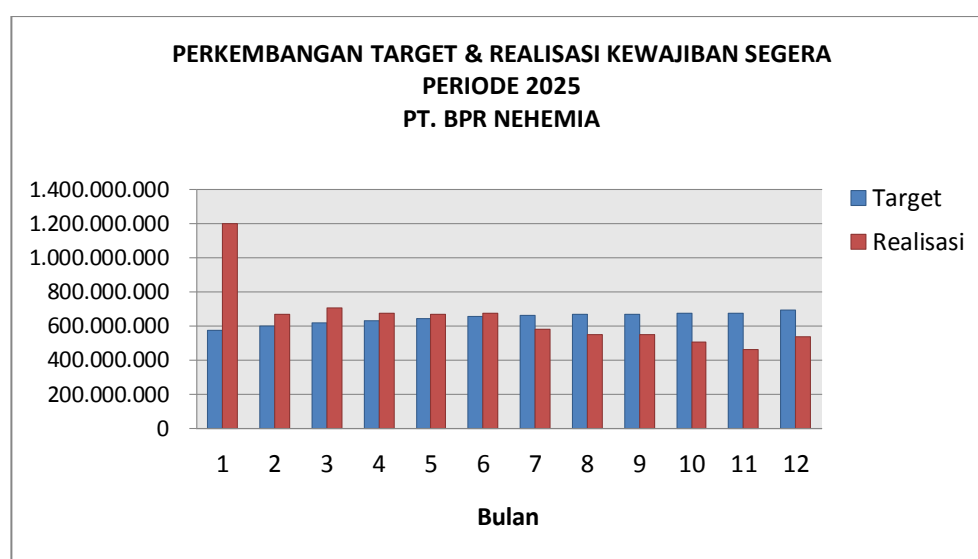


## 2. Kewajiban Segera

Penghimpunan dana pihak ketiga melalui Kewajiban Segera sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 537308,- ribu, jumlah tersebut

berada di bawah target yang direncanakan, dimana pencapaian target sebesar 77,61 % dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 692.286,- ribu begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 25,47 %, saldo Kewajiban Segera tahun sebelumnya sebesar Rp. 720.950,- ribu.

Lebih lengkap tentang perkembangan kewajiban segera nampak pada gambar di bawah ini.



## B. Penyaluran Dana

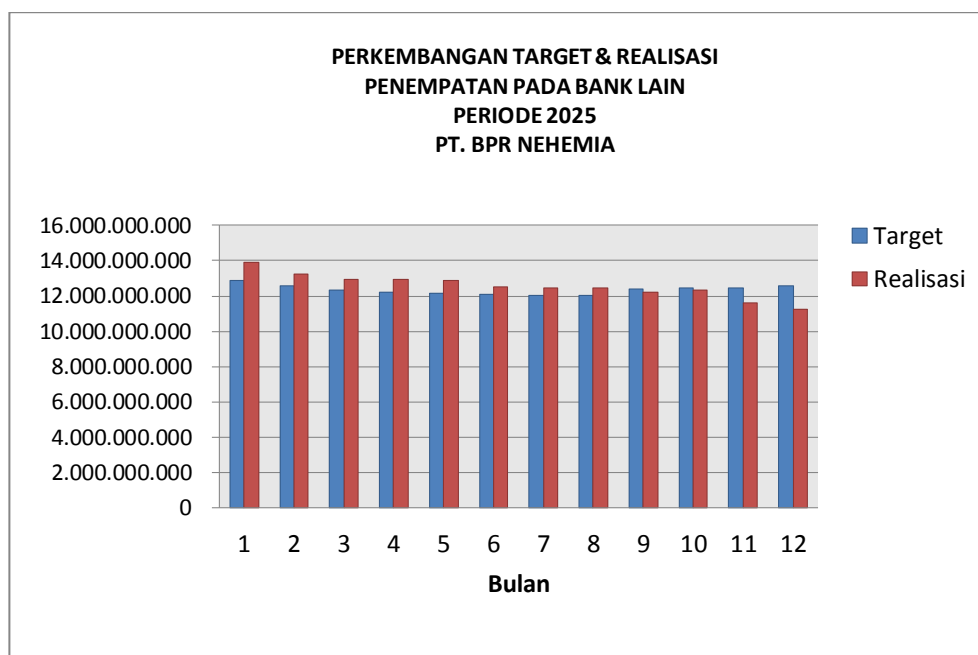
Melihat kondisi perkembangan usaha tahun 2025 terdapat peningkatan ekspansi kredit dari tahun sebelumnya, dimana sampai dengan akhir tahun 2025 outstanding kredit sebesar Rp. 10.169.065,- ribu, jumlah tersebut berada di atas target yang direncanakan, dengan pencapaian target sebesar 104,80 %, target yang direncanakan sebesar Rp. 9.703.423,- ribu begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan sebesar 28,54 %, saldo outstanding kredit tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.911.058,- ribu. Pertumbuhan ini belum sepenuhnya dapat menyerap sumber dana yang dimiliki BPR, maka untuk mengantisipasi agar BPR tidak mengalami idle money, BPR menempatkan kelebihan dananya dalam pos Penempatan Pada Bank Lain (PBL). Hal dimaksudkan agar aset BPR tetap produktif.

Selanjutnya perkembangan dari masing-masing penyaluran dana pihak ketiga selama periode 2023 dapat Kami informasikan sebagai berikut :

**1. Penyaluran Dana PBL**

Penyaluran dana berupa penempatan dana pada bank lain (PBL) sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 11.223.647,- ribu jumlah tersebut berada di bawah target yang direncanakan, dengan pencapaian target sekitar 89,08 %, adapun target yang direncanakan sebesar Rp. 12.599.978,- ribu begitupun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 19,30 %, saldo penempatan dana pada bank lain (PBL) tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.908.093, jumlah tersebut tersebar di beberapa Bank Umum dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas BPR masih terjaga dengan baik.

Lebih lengkap tentang penyaluran dana PBL, nampak pada gambar di bawah ini.

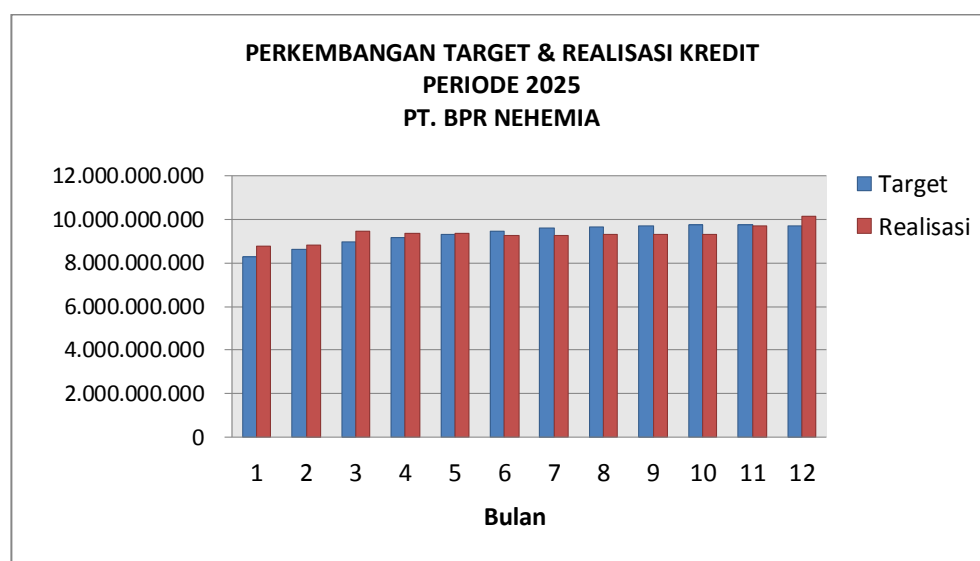


**2. Penyaluran Dana Kredit**

Penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar Rp. 10.169.064,- ribu jumlah tersebut berada di

bawah atas yang direncanakan, dengan pencapaian target sekitar 104,80 %, dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 9.703.403,- ribu. begitupun jika dibandingkan dengan semester yang sama tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 28,54 %, saldo pinjaman yang diberikan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7.911.054, ribu, Kondisi menunjukkan adanya peningkatan usaha BPR yang selama ini secara terus menerus mengalami penurunan. Diharapkan kedepan ekspansi kredit dapat terus tumbuh dan berkembang.

Lebih lengkap tentang penyaluran dana kredit, nampak pada gambar di bawah ini.



### 3. Klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu

#### a. Pinjaman Yang Diberikan

Mengacu pada laporan aktiva produktif akhir tahun 2024, atas Pinjaman yang diberikan, maka berikut kami informasikan jumlah rekening yang dibiayai BPR atas pinjaman yang diberikan apabila dilihat jangka waktu kredit, yang akan Kami sajikan dalam tabel di bawah ini :

KLASIFIKASI PINJAMAN YANG DIBERIKAN  
PERIODE DESEMBER 2025  
(dalam ribuan rupiah)

JANGKA WAKTU	JUMLAH REKENING	JUMLAH AKTIVA PRODUKTIF
3	24	77.650
6	1	3.467
12	94	4.385.497
18	74	943.295
24	142	2.083.564
29	1	15.073
30	1	28.302
35	2	48.711
36	47	989.571
42	1	10.017
48	6	103.324
60	45	760.840
72	4	105.701
78	1	11.999
84	25	602.054
TOTAL	468	10.169.064

**b. Penempatan dana Pada Bank Lain**

Mengacu pada laporan aktiva produktif akhir tahun 2025, atas penempatan dana pada bank lain (PBL), maka perlu kami informasikan bahwa Penempatan dana pada Bank Lain yang dimiliki BPR tersebar di beberapa bank umum, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

PT BPR NEHEMIA

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.05</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: JUMLAH, JENIS DAN LOKASI KANTOR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Sandi Kantor	Nama Kantor	Koordinat Kantor	Alamat Kantor				Nama Pimpinan
				Nama Jalan dan No.	Desa/Kecamatan	Kab./Kota	Kode Pos	
1	001	Kantor Pusat	-6.842844,107.485456	Jl. Raya Padalarang No. 546	Kertamulia	0122 (Kab. Bandung Barat)	40553	Edrianto Sitorus

No. Telp	Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas	Status Kepemilikan Gedung
	Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap							
	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya		
(022) 6809121	0	1	2	1	3	0	0	0	2	0	2	1	0	Sewa

Jumlah Kas Keliling	Jumlah EDC			ATM		
	EDC Milik Sendiri	EDC milik BU	EDC Milik BPR Lain	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerja sama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerja Sama dengan BPR
0	0	1	0	0	0	Tidak Ada

Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan				Jumlah Pegawai						
Keterangan Data Kantor	Surat Persetujuan		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap		
	No.	Tanggal			Pemasaran	Pelayanan	Lainnya	Pemasaran	Pelayanan	Lainnya
Tidak berubah	-	-	-	-	1	1	5	0	1	4

PT BPR NEHEMIA

Jumlah Pegawai						
Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Usia				
Laki-Laki	Perempuan	<25	>25-35	>35-45	>45-55	>55
7	5	2	1	3	4	2

Jenis	Kode Kantor	Sandi Kantor Induk	Sandi Kantor Sebelumnya	Nama Kantor	Koordinat	Alamat	Nama Pimpinan

No. Telepon	Keterangan Data Kantor	Tanggal Pelaksanaan	Sandi Kantor Kendali	Tanggal Persetujuan

PT BPR NEHEMIA

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.06</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KERJASAMA BPR DENGAN BANK, LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) LAIN, ATAU LEMBAGA LAIN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Nama Bank/LJK Lain/ Lembaga Lain</b>	<b>Sandi Bank / NPWP</b>	<b>Jenis Kerjasama</b>	<b>Uraian Kerjasama</b>	<b>Tanggal Mulai kerjasama</b>
PT. Amarta Sayap Merah	033326646421000	Pembiayaan Produk Kenadraan Motor Honda	Pembiayaan kendraan bermotor roda dua merk Honda dengan berbagai type terhadap Nasabah sesuai permintaan	07/02/2024
PT. Asuransi Simas Jiwa	016904633062000	Penutupan Asuransi Jiwa Kredit	Perlindungan kepentingan BPR selaku pemberi pinjaman kepada nasabah dimana pihak asuransi akan membayarkan manfaat asuransi bagi BPR jika terjadi risiko yang dipertanggungkan	12/09/2022
PT. Asuransi Sinar Mas	013911490025000	Referensi Asuransi Kerugian dalam rangka produk Bank (Bancassurance)	Referensi Asuransi Kerugian dalam rangka produk Bank (Bancassurance)	21/06/2022
PT. Cakrabuana Insurance Brokers	828252429453000	Keperantaraan Penutupan Asuransi Kredit	Kerjasama keperantaraan Penutupan Asuransi Kredit	22/08/2022

Selama tahun 2025 BPR NEHEMIA tidak bekerjasama dengan BPR atau Bank Umum lainnya.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.07.1</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – BIDANG TUGAS DAN KOMPOSISI PEGAWAI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Komposisi Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Bidang Tugas</b>	
1. Pemasaran	1
2. Pelayanan	2
3. Lainnya	9
<b>Status Kepegawaian</b>	
1. Pegawai Tetap	7
2. Pegawai Tidak Tetap	5
<b>Tingkat Pendidikan</b>	
1. S3	0
2. S2	1
3. S1/D4	4
4. D3	1
5. SMA	5
6. Lainnya	1
<b>Jenis Kelamin</b>	
1. Laki-Laki	7
2. Perempuan	7
<b>Usia</b>	
1. Usia ≤ 25 tahun	3
2. Usia > 25 – 35 tahun	2
3. Usia > 35 – 45 tahun	3
4. Usia > 45 – 55 tahun	4
5. Usia > 55 tahun	2

<b>Kode Form</b>	<b>: Form A.05.07.2</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	08/01/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	GCG
Pelatihan	09/01/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	2	Pembahasan Kebijakan pembentukan CKPN sesuai standar SAK-EP
Pelatihan	15/01/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	GCG
Pelatihan	17/01/2025	Eksternal BPR	Pegawai	3	Sosialisasi APOLO modul Laporan Berkala Bulanan BPR/BPRS
Pelatihan	18/01/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	GCG
Pelatihan	20/01/2025	Eksternal BPR	Pegawai	4	Pemaparan dan Diskusi Mengenai Perhitungan Pembentukan CKPN sesuai SAK-EP
Pelatihan	21/01/2025	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	2	Laporan Penilaian Sendiri dan Pengkinian data Pokok BPR
Pelatihan	22/01/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	GCG
Pelatihan	23/01/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Efektivitas Penerapan, Penilaian Kebijakan dan Pengkinian Kebijakan GCG BPR
Pelatihan	25/01/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	GCG
Pelatihan	30/01/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Sosialisasi Ketentuan Panduan Akutansi Perbankan Bagi BPR
Pelatihan	30/01/2025	Eksternal BPR	Pegawai	2	Workshop pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) kepada PUJK
Pelatihan	05/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	08/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	12/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	15/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	19/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan

*PT BPR NEHEMIA*

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	24/02/2025	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	2	Sosialisasi POJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku melalui Sistem Informasi Pelaku di SJK (SIPELAKU) dan mekanisme penggunaan SIPELAKU
Pelatihan	26/02/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	05/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	08/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	12/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	15/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	19/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	26/03/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	09/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	APU PPT
Pelatihan	12/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	Panduan Akutansi Perbankan
Pelatihan	15/04/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Sosialisasi APOLO Modul Laporan Tahunan BPR
Pelatihan	16/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	APU PPT
Pelatihan	16/04/2025	Eksternal BPR	Pegawai	2	Laporan Capaian Program GENCARKAN tahun 2024 dan Sosialisasi Prgram Literasi Keuangan Tahun 2025
Pelatihan	19/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	11	APU PPT
Pelatihan	23/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	APU PPT
Pelatihan	25/04/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Evaluasi Kinerja Lembaga Jasa Keuangan serta Sosialisasi Indonesia Anti Scam Center (IASC) tahun 2025
Pelatihan	29/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	1	Penyampaian Laporan Informasi Keuangan
Pelatihan	30/04/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Peningkatan Kredit
Pelatihan	07/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Peningkatan Kredit
Pelatihan	10/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Peningkatan Kredit
Pelatihan	14/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Ketentuan Kredit
Pelatihan	16/05/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Sosialisasi Ketentuan BPR
Pelatihan	17/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Ketentuan Kredit
Pelatihan	21/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Ketentuan Kredit
Pelatihan	28/05/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Strategi Menyasar Pasar Aman
Pelatihan	04/06/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	APU PPT (Review)
Pelatihan	07/06/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Teknik Lapangan yg Efektif
Pelatihan	11/06/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	APU PPT (Review)

*PT BPR NEHEMIA*

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	14/06/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	APU PPT (Review)
Pelatihan	18/06/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Briefing Internal
Pelatihan	19/06/2025	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisasi SIPEDULI Modul Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Laporan Layanan Pengaduan Semester 1 tahun 2025
Pelatihan	24/06/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Strategi FRM, Investigasi Fraud dan Risk based Audit untuk BPR/BPRS yang Tangguh
Pelatihan	26/06/2025	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	1	Seminar "ERM Practice Sharing"
Pelatihan	26/06/2025	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Bulan Literasi Keuangan " Protecting Consumers : What Matters Most"
Pelatihan	02/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Penerapan GRC dalam BPR
Pelatihan	05/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Penerapan GRC dalam BPR
Pelatihan	09/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Penerapan GRC dalam BPR
Pelatihan	16/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	19/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	23/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	30/07/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	06/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	09/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	13/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Service Excellent
Pelatihan	16/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Service Excellent
Pelatihan	20/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	10	Service Excellent
Pelatihan	27/08/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Service Excellent
Pelatihan	03/09/2025	Eksternal BPR	Pegawai	2	Sosialisasi BIK
Pelatihan	03/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Strategi Marketing BPR yang Efektif & Efisien
Pelatihan	06/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Strategi Marketing BPR yang Efektif & Efisien
Pelatihan	10/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Strategi Marketing BPR yang Efektif & Efisien
Pelatihan	17/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Strategi Marketing BPR yang Efektif & Efisien
Pelatihan	24/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Self Assesment Perlindungan Konsumen
Pelatihan	27/09/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Self Assesment Perlindungan Konsumen
Pelatihan	01/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Panduan Akutansi Perbankan bagi BPR
Pelatihan	08/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Panduan Akutansi Perbankan bagi BPR
Pelatihan	09/10/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	2	Pemeliharaan Sertifikasi Kompetensi Komisaris
Pelatihan	10/10/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	2	Pemeliharaan Sertifikasi Kompetensi Komisaris

*PT BPR NEHEMIA*

Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan	11/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	9	Panduan Akutansi Perbankan bagi BPR
Pelatihan	11/10/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	2	Pemeliharaan Sertifikasi Kompetensi Komisaris
Pelatihan	15/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	6	Laporan Keuangan untuk Account Officer
Pelatihan	15/10/2025	Eksternal BPR	Pejabat Eksekutif	1	Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pelatihan	18/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	6	Laporan Keuangan untuk Account Officer
Pelatihan	22/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Laporan Keuangan untuk Account Officer
Pelatihan	29/10/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Laporan Keuangan untuk Account Officer
Pelatihan	30/10/2025	Eksternal BPR	Pegawai	1	Workshop pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI)
Pelatihan	05/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Strategi Inti (Cepat & Aman)
Pelatihan	06/11/2025	Eksternal BPR	Direksi dan/atau Dewan Komisaris	1	Sosialisasi APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR
Pelatihan	08/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Strategi Inti
Pelatihan	11/11/2025	Eksternal BPR	Pegawai	1	Sosialisasi Ketentuan POJK 22 Tahun 2023
Pelatihan	12/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	15/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	19/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	6	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	26/11/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Perlindungan Konsumen
Pelatihan	03/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	8	Team Work
Pelatihan	10/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work
Pelatihan	13/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work
Pelatihan	17/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work
Pelatihan	20/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work
Pelatihan	24/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work
Pelatihan	31/12/2025	Internal BPR	Seluruh pegawai	7	Team Work

Anggaran pelatihan dan pendidikan yang dicadangkan BPR sampai tahun 2025, masih dapat mengcover kebutuhan biaya dalam hal pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM BPR, untuk mengaplikasikan dana tersebut BPR telah mengikut sertakan karyawan dalam berbagai jenis pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi karyawan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan usaha BPR. Sampai dengan akhir Desember 2025 pelaksanaan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak ekstern pada umumnya dilakukan secara

daring maupun luring, sementara pelaksanaan internal dilakukan secara tatap muka yang diikuti oleh seluruh karyawan diluar staf umum.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form B.01.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Aset</b>	<b>Posisi 31 Desember 2025</b>	<b>Posisi 31 Desember 2024</b>
Kas dalam Rupiah	83.461.800	69.880.000
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	11.223.646.983	13.908.093.127
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	50.000.000	69.540.466
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	10.169.064.931	7.911.058.050
-/- Provisi yang belum diamortisasi	51.656.925	52.556.252
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	0	0
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.815.812.276	1.862.769.970
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang diambil alih	0	0
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	372.477.080	372.477.080
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	368.646.031	365.600.860
Aset Tidak Berwujud	36.100.000	36.100.000
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	36.099.994	36.099.994
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Aset Lainnya	248.696.196	153.766.218
<b>TOTAL ASET</b>	<b>19.811.241.764</b>	<b>20.064.806.933</b>

PT BPR NEHEMIA

Liabilitas dan Ekuitas	Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
<b>LIABILITAS</b>		
Liabilitas Segera	537.307.925	720.950.268
Simpanan		
a. Tabungan	1.325.638.186	1.387.414.913
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
b. Deposito	7.985.000.000	9.061.000.000
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas lainnya	402.425.737	397.589.680
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>10.250.371.848</b>	<b>11.566.954.861</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	7.000.000.000	7.000.000.000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	5.000.000.000	5.000.000.000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	403.000.000	403.000.000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Laba Tahun lalu	7.121.928.002	6.066.331.328
b. Laba Tahun Berjalan	35.941.914	28.520.744
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9.560.869.916</b>	<b>8.497.852.072</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>19.811.241.764</b>	<b>20.064.806.933</b>

<b>Kode Form</b>	<b>: Form B.02.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
<b>Pendapatan Operasional</b>		<b>2.766.125.567</b>	<b>2.515.298.100</b>
1	Pendapatan Bunga		
	a Bunga Kontraktual		
	i. Surat Berharga	0	0
	ii. Penempatan pada Bank Lain		
	Giro	26.885	69.541
	Tabungan	1.906.068	3.890.088
	Deposito	696.199.873	691.766.432
	Sertifikat Deposito	0	0
	iii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	0	0
	Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	1.789.214.708	1.690.535.700
	b Provisi Kredit		
	i. Kepada Bank Lain	0	0
	ii. Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	92.463.974	87.417.296
	c Biaya Transaksi -/-		
	i. Surat Berharga	0	0
	ii. Kredit yang Diberikan		
	Kepada Bank Lain	0	0
	Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	0	0
	d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2	Pendapatan Lainnya		
	a Pendapatan Jasa Transaksi	0	0
	b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
	c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
	d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	54.645.700	1.693.500
	e Pemulihan CKPN	101.790.451	0
	f Dividen	0	0
	g Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
	h Keuntungan penjualan AYDA	0	0
	i Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
j	Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k	Lainnya	29.877.908	39.925.543
<b>Beban Operasional</b>		<b>2.725.226.503</b>	<b>2.483.781.396</b>
1	Beban Bunga		
a	Beban Bunga Kontraktual		
i.	Tabungan	15.032.657	14.879.542
ii.	Deposito	500.575.138	513.922.947
iii.	Simpanan dari Bank Lain	0	0
iv.	Pinjaman yang diterima		
1)	Dari Bank Indonesia	0	0
2)	Dari Bank Lain	0	0
3)	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4)	Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v.	Lainnya	0	0
b	Biaya Transaksi		
i.	Kepada Bank Lain	0	0
ii.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2	Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3	Beban Cadangan Kerugian Nilai		
a.	Surat Berharga	0	0
b.	Penempatan pada Bank Lain	0	0
c.	Kredit yang Diberikan		
i.	Kepada Bank Lain	0	0
ii.	Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	119.099.729	0
d	Penyertaan Modal	0	0
e	Aset Keuangan Lainnya	0	0
4	Beban Pemasaran	1.080.536	1.422.880
5	Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6	Beban Administrasi dan Umum		
a	Beban Tenaga Kerja		
i.	Gaji dan Upah	701.960.028	741.958.688
ii.	Honorarium	141.600.000	142.161.428
iii.	Lainnya	75.617.482	59.770.700
b	Beban Pendidikan dan Pelatihan	120.333.725	49.653.314
c	Beban Sewa		
i.	Gedung Kantor	525.000.000	500.000.000
ii.	Lainnya	234.000.000	186.000.000
d	Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	3.045.171	5.828.428
e	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
f	Beban Premi Asuransi	75.789.918	70.249.706
g	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	5.365.000	3.970.500
h	Beban Barang dan Jasa	136.354.756	119.634.062
i	Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j	Kerugian terkait risiko operasional		
	i. Kecurangan internal	0	0
	ii. Kejahatan eksternal	0	0
k	Pajak-pajak	57.061.586	54.634.086
7	Beban Lainnya		
a	Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b	Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d	Kerugian penjualan AYDA	0	0
e	Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f	Lainnya	13.310.777	15.350.929
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>		<b>40.899.064</b>	<b>31.516.704</b>
<b>Pendapatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Keuntungan Penjualan		
a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2	Pemulihan Penurunan Nilai		
a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b	Lainnya	0	0
3	Bunga Antar Kantor	0	0
4	Selisih Kurs	0	0
5	Lainnya	0	0
<b>Beban Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2	Kerugian Penurunan Nilai		
a	Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b	Lainnya	0	0
3	Bunga Antar Kantor	0	0
4	Selisih Kurs	0	0
5	Lainnya	0	0
<b>Laba (Rugi) Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak</b>		<b>40.899.064</b>	<b>31.516.704</b>
Taksiran Pajak Penghasilan		4.957.150	2.995.960
Pendapatan Pajak Tangguhan		0	0
Beban Pajak Tangguhan		0	0
<b>Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>		<b>35.941.914</b>	<b>28.520.744</b>

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			
1	Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b.	Lainnya	0	0
c.	Pajak Penghasilan terkait	0	0
2	Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b.	Lainnya	0	0
c.	Pajak Penghasilan terkait	0	0
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kode Form</b>	<b>: Form B.03.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Nama Rekening		Posisi 31 Desember 2025	Posisi 31 Desember 2024
Tagihan Komitmen			
a.	Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b.	Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen			
a.	Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b.	Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
c.	Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi			
a.	Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
	1) Bunga Kredit yang Diberikan	229.966.126.109	128.105.357.150
	2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
	3) Surat Berharga	0	0
	4) Lainnya	0	0
b.	Aset Produktif yang dihapusbuku		
	1) Kredit yang Diberikan	765.438.325	772.654.575
	2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
	3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	3.915.879.550	3.962.897.150
	4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c.	Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d.	Tagihan Kontinjensi Lainnya	0	0
Kewajiban Kontinjensi		0	0
Rekening Administratif Lainnya		0	0

*PT BPR NEHEMIA*

<b>Kode Form</b>	<b>: Form B.04.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Pos	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah
<b>Saldo per 31 Des Tahun 2023</b>	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	6.076.533.334	8.479.533.334
Dividen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0	0	0	0	28.520.744	28.520.744
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	- 10.202.006	- 10.202.006
<b>Saldo per 31 Des Tahun 2024</b>	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	6.094.852.072	8.497.852.072
Dividen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSM Ekuitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0	0	0	0	0	0	0	0	35.941.914	35.941.914
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.075.930	1.027.075.930
<b>Saldo per 31 Des Tahun 2025</b>	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	403.000.000	7.157.869.916	9.560.869.916

<b>Kode Form</b>	<b>: Form B.05.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN ARUS KAS</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Pos</b>	<b>31 Des 2025</b>	<b>31 Des 2024</b>
Penerimaan pendapatan bunga	2.487.347.534	2.386.261.761
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	92.463.974	87.417.297
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukkan	54.645.700	1.693.500
Pendapatan operasional lainnya	131.668.359	39.925.543
Pembayaran beban bunga	(515.607.795)	(528.802.489)
Beban gaji dan tunjangan	(919.177.510)	(997.888.316)
Beban umum dan administrasi	(1.156.950.156)	(941.739.662)
Beban operasional lainnya	(133.491.042)	(15.350.929)
Pendapatan non operasional lainnya	0	0
Beban non operasional lainnya	0	0
Pembayaran pajak penghasilan	(4.957.150)	(2.995.960)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	2.664.905.678	(474.048.671)
Kredit yang diberikan	(2.305.873.902)	(591.600.851)
Agunan yang diambil alih	0	0
Aset lain-lain	(91.884.807)	(1.493.314)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(183.642.343)	101.169.182
Tabungan	(61.776.727)	158.110.469
Deposito	(1.076.000.000)	761.000.000
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	4.836.057	2.405.096
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
<b>Arus Kas neto dari aktivitas operasi</b>	<b>(1.013.494.130)</b>	<b>(15.937.344)</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas Investasi</b>		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	0	0
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0

PT BPR NEHEMIA

Pos	31 Des 2025	31 Des 2024
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
<b>Arus Kas neto dari aktivitas Investasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas Pendanaan</b>		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	1.027.075.930	(10.202.006)
<b>Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan</b>	<b>1.027.075.930</b>	<b>(10.202.006)</b>
<b>Peningkatan (Penurunan) Arus Kas</b>	<b>13.581.800</b>	<b>(26.139.350)</b>
<b>Kas dan setara Kas awal periode</b>	<b>69.880.000</b>	<b>96.019.350</b>
<b>Kas dan setara Kas akhir periode</b>	<b>83.461.800</b>	<b>69.880.000</b>

<b>Kode Form</b>	<b>: Form C.01.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: LAPORAN AKUNTAN PUBLIK</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

**LAPORAN KEUANGAN**

**PT. BPR NEHEMIA**

Untuk Tahun Berakhir  
31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

**DAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi	
Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2025 dan 2024	1-2
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	3-4
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	5
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	6-7
Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	8-30
	<b>Lampiran</b>
Analisis Rasio Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA	I - III



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NEHEMIA

Jl. Raya Padalarang No. 546 Telp. (022) 6809121 – Fax. (022) 6808456  
Padalarang 40553, Kabupaten Bandung Barat

## SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang  
**TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
PT. BPR NEHEMIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edrianto Sitorus  
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR NEHEMIA  
Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 546 Kab. Bandung Barat

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA
2. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Intern dalam PT. BPR NEHEMIA

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padalarang, 28 April 2026

**PT. BPR NEHEMIA**



**Edrianto Sitorus**  
Direktur Utama



Nomor : 00060/2.0570/AU.8/07/1371-4/1/IV/2026

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,  
Dewan Komisaris dan Direksi  
PT. BPR NEHEMIA  
JL. Raya Padalarang No. 546  
di Kab. Bandung Barat

### *Opini Wajar Dengan Pengecualian*

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR NEHEMIA, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar Dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)

### *Basis Opini Wajar Dengan Pengecualian*

Sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan poin 2.19 bahwa perusahaan BPR NEHEMIA sampai saat ini mengadopsi ketentuan pemberian imbalan pasca kerja sesuai UU No. 11 Tahun 2020 kemudian dirubah kembali dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke dalam peraturan intern perusahaan. Namun BPR belum melakukan pencadangan kembali pada tahun 2025 sesuai dengan ketentuan SAK EP Bab 28 dimana pencadangan wajib dihitung dan diakui setiap tahun.

Kemudian sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan poin 4.17 bahwa menerapkan SAK EP secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam standar tersebut dengan melakukan koreksi atas laba (rugi) tahun lalu sebesar Rp 1.029.245.143,- (*Satu milyar dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah*). Namun perusahaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip dasar retrospektif, karena perusahaan belum menyajikan kembali laporan keuangan dengan angka komparatif tahun sebelumnya agar selaras dengan persyaratan SAK EP.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

### **Hal Lain**

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan pada lampiran yang disertakan disajikan untuk tujuan analisis tambahan bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar dalam semua hal material, berkaitan dengan laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen

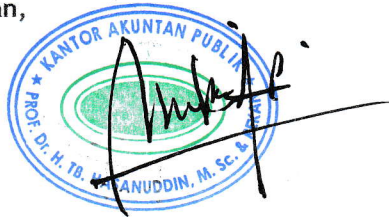
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik

Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, MSc. & Rekan

Rekan,



Mochammad Rivai, SE., Ak., CA., CPA

No. Izin AP : 1371

No. Izin UKAP : Kep-353/KM.6/2003

Bandung, 28 April 2026



**PT. BPR NEHEMIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	2.4 , 4.1	83,461,800	69,880,000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	2.5 , 4.2	247,196,196	153,311,218
Penempatan Pada Bank Lain	2.6, 4.3	11,223,646,983	13,908,093,127
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan Bank Lain	2.7, 4.3	(50,000,000)	(69,540,466)
Kredit Yang Diberikan (Neto)	2.8, 4.4	10,117,418,006	7,858,501,798
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	2.7, 4.4	(1,815,812,276)	(1,862,769,970)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<u><b>19,805,910,709</b></u>	<u><b>20,057,475,707</b></u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap - Bersih	2.10, 4.5	3,831,049	6,876,220
Aset Tidak Berwujud - Bersih	4.6	6	6
Aset Lain-lain	4.7	1,500,000	455,000
Aset Pajak Tangguhan	4.8	-	-
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<u><b>5,331,055</b></u>	<u><b>7,331,226</b></u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>19,811,241,764</b></u>	<u><b>20,064,806,933</b></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BPR NEHEMIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS LANCAR</b>			
Liabilitas Segera Dibayar	2.12, 4.9	537,307,925	720,950,268
Utang Bunga	2.13, 4.10	10,177,398	12,681,095
Utang Pajak	2.18, 4.11	4,407,150	2,445,960
Simpanan	2.14, 4.12	9,310,638,186	10,448,414,913
Liabilitas Lain-lain	4.14	13,585,014	8,206,450
<b>JUMLAH LIABILITAS LANCAR</b>		<b><u>9,876,115,673</u></b>	<b><u>11,192,698,686</u></b>
<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	4.13	374,256,175	374,256,175
Liabilitas Pajak Tangguhan	4.15	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>		<b><u>374,256,175</u></b>	<b><u>374,256,175</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>10,250,371,848</u></b>	<b><u>11,566,954,861</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal Saham</b>	4.16		
Modal Saham		2,000,000,000	2,000,000,000
<b>JUMLAH MODAL</b>		<b><u>2,000,000,000</u></b>	<b><u>2,000,000,000</u></b>
<b>Saldo Laba</b>			
Cadangan Umum	4.17	403,000,000	403,000,000
<b>Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya</b>			
Laba (Rugi) Tahun Lalu		7,121,928,002	6,066,331,328
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		35,941,914	28,520,744
<b>Penghasilan Komprehensif Lainnya</b>		-	-
<b>JUMLAH SALDO LABA</b>		<b><u>7,560,869,915</u></b>	<b><u>6,497,852,072</u></b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b><u>9,560,869,915</u></b>	<b><u>8,497,852,072</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>19,811,241,763</u></b>	<b><u>20,064,806,933</u></b>

Atas nama dan mewakili Direksi  
28 April 2026

Edrianto Sitorus  
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BPR NEHEMIA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pendapatan Bunga</b>	2.13, 4.18		
Pendapatan Bunga Kontraktual		2,487,347,534	2,386,261,761
Provisi	2.15, 4.18	92,463,974	87,417,296
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>		<b>2,579,811,508</b>	<b>2,473,679,057</b>
<b>Beban Bunga</b>			
Beban Bunga Kontraktual	2.16, 4.19	515,607,795	528,802,489
<b>Jumlah Beban Bunga</b>		<b>515,607,795</b>	<b>528,802,489</b>
Pendapatan Bunga (Neto)		2,064,203,714	1,944,876,568
Pendapatan Operasional Lainnya	4.18	186,314,058	41,619,043
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>2,250,517,772</b>	<b>1,986,495,611</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
	4.2		
Beban Cadangan kerugian Nilai Aset Produktif		119,099,729	-
Beban Pemasaran		1,080,536	1,422,880
Beban Administrasi dan Umum		2,076,127,666	1,938,205,098
Beban Operasional Lainnya		13,310,777	15,350,929
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>2,209,618,708</b>	<b>1,954,978,907</b>
<b>LABA RUGI OPERASIONAL</b>		<b>40,899,063</b>	<b>31,516,704</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>			
	4.21		
Pendapatan Non Operasional		-	-
Beban Non Operasional		-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>40,899,063</b>	<b>31,516,704</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>			
	2.17, 4.22		
Taksiran Pajak Penghasilan		4,957,150	2,995,960
Pendapatan Pajak Tangguhan		-	-
<b>JUMLAH BEBAN PAJAK</b>		<b>4,957,150</b>	<b>2,995,960</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR NEHEMIA  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>			
Selisih Revaluasi Aset Tetap (Neto)			
(Keuntungan)/Kerugian Aktuarial manfaat pasti			
Lainnya			
<b>Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>			
Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset			
Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual			
Lainnya			
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>35,941,914</b>	<b>28,520,744</b>

Atas nama dan mewakili Direksi  
28 April 2026

Edrianto Sitorus  
Direktur Utama

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BPR NEHEMIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	MODAL DISETOR	CADANGAN UMUM	SALDO LABA	JUMLAH EKUITAS
Saldo per 1 Januari 2024	2,000,000,000	403,000,000	6,076,533,334	8,479,533,334
Penambahan/Pengurangan	-	-	(10,202,006)	(10,202,006)
Laba Tahun Berjalan	-	-	28,520,744	28,520,744
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2024</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>403,000,000</b>	<b>6,094,852,072</b>	<b>8,497,852,072</b>
Penambahan/Pengurangan	-	-	1,027,075,930	1,027,075,930
Laba Tahun Berjalan	-	-	35,941,914	35,941,914
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2025</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>403,000,000</b>	<b>7,157,869,915</b>	<b>9,560,869,915</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BPR NEHEMIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**31 DESEMBER 2025**  
**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>31 DESEMBER 2025</b>	<b>31 DESEMBER 2024</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI METODE LANGSUNG</b>		
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penerimaan pendapatan bunga	2,487,347,534	2,386,261,761
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	92,463,974	87,417,297
Penerimaan beban klaim asuransi	-	-
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	54,645,700	1,693,500
Pendapatan operasional lainnya	131,668,358	39,925,543
Pembayaran beban bunga	(515,607,795)	(528,802,489)
Beban gaji dan tunjangan	(919,177,510)	(943,890,816)
Beban umum dan administrasi	(1,156,950,156)	(995,737,162)
Beban operasional lainnya	(133,491,042)	(15,350,929)
Pendapatan non operasional lainnya	-	-
Beban non operasional lainnya	-	-
Pembayaran pajak penghasilan	(4,957,150)	(2,995,960)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	-	-
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	2,664,905,678	(474,048,671)
Kredit yang diberikan	(2,305,873,902)	(591,600,851)
Agunan yang diambil alih	-	-
Aset lain-lain	(91,884,807)	(1,493,314)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	-	-
Penurunan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(183,642,343)	101,169,182
Simpanan	(1,137,776,727)	919,110,469
Liabilitas imbalan kerja	-	-
Liabilitas lain-lain	4,836,057	2,405,096
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	-	-
<b>ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>(1,013,494,131)</b>	<b>(15,937,344)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	-	-
Penyesuaian lainnya	-	-
<b>ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR NEHEMIA  
LAPORAN ARUS KAS  
31 DESEMBER 2025  
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2024  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	-	-
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan		-
Pembayaran dividen	-	-
Penyesuaian lainnya	1,027,075,930	(10,202,006)
<b>ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<u>1,027,075,930</u>	<u>(10,202,006)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) PENURUNAN ARUS KAS</b>	<u>13,581,799</u>	<u>(26,139,350)</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>69,880,000</b>	<b>96,019,350</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<u><b>83,461,800</b></u>	<u><b>69,880,000</b></u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**1. UMUM**

**1. Pendirian Perusahaan**

PT. Bank Perkreditan Rakyat NEHEMIA yang berkedudukan di Bandung didirikan berdasarkan Akte Nomor 03 tanggal 19 Agustus 1989 dari Notaris Iwan Halimy, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-903.HT.01.01.TH 90 Tanggal 21 Pebruari 1990.

Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir akte nomor 1 tanggal 07 April 2016 dari Notaris Harry Teddy Suganda, S.H., mengenai pengangkatan Direksi dan Komisaris perseroan, akte perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0038414 Tahun 2016 tanggal 8 April 2016.

Akta terakhir tercantum pada Akta No. 05 tanggal 30 Oktober 2024 mengenai perubahan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0069599.AH.01.02 tanggal 30 Oktober 2024.

**2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari perseroan adalah berusaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

**3. Lokasi Kantor**

Perusahaan berkedudukan di Jl. Raya Padalarang NO. 546 Kabupaten Bandung Barat.

**4. Legalitas dan Perizinan**

Akte Pendirian	: No. 03
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.494.495.3-421.000
Surat Izin Usaha BPR	: KEP-22/KM.13/1990
Tanda Daftar Perusahaan	: 91203070131862

**5. Kepengurusan**

Susunan Pengurus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Rosi Rostianti
Komisaris	: Pahala Silitonga

Dewan Direksi :

Direktur Utama	: Edrianto Sitorus
Direktur	: Nimas Ayu Pamungkas

**6. Modal Perusahaan**

Modal dasar sebesar Rp. 7.000.000.000 (Tujuh milyar rupiah) terbagi atas 1.400 (Seribu empat ratus ) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) per lembar saham.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**6. Modal Perusahaan (Lanjutan)**

Dari jumlah tersebut telah disetor oleh para pemegang saham sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham atau sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :

Kepemilikan Saham Tahun 2025 :

Pemegang Saham 2022		Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor	Prosentase Kepemilikan	Jumlah (Rp)
Robinson Sitorus		304	76,00%	1.520.000.000
Edrianto Sitorus		96	24,00%	480.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>

**7. Jumlah Karyawan**

Jumlah Karyawan PT. BPR NEHEMIA per 31 Desember 2025 sebanyak 14 orang, termasuk 2 (dua) Direksi dan 2 (dua) Dewan Komisaris.

**8. Komitmen Dan Perjanjian Penting**

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan perjanjian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

**9. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada 28 April 2026

**10. Peristiwa Kemudian**

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan tidak terdapat peristiwa kemudian yang dapat mempengaruhi Laporan Keuangan.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) yang dikeluarkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 21/SEOJK.03.2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Perkeonomian Rakyat . Laporan keuangan telah disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali dinyatakan lain. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, item diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika item memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk item tersebut.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama 1 (satu) periode yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Dalam metode langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi disajikan dengan mengungkapkan informasi mengenai kelas utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Informasi tersebut dapat diperoleh, salah satu dari: (a) dari catatan akuntansi entitas; atau (b) dengan menyesuaikan penjualan, beban penjualan dan item lainnya dalam laporan penghasilan komprehensif (atau laporan laba rugi, jika disajikan) untuk: (i) perubahan dalam persediaan dan piutang serta utang usaha selama periode; (ii) item nonkas lain; dan (iii) item lain di mana kasnya berdampak pada arus kas investasi atau arus kas pendanaan.

**2. Mata Uang Pelaporan**

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

**3. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa/ Pihak Berelasi**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Pihak berelasi adalah orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: (i) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor; (ii) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; atau (iii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- (i) Entitas tersebut dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya setiap entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi satu dengan yang lainnya).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lainnya (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga yang sama.
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga tersebut.
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja bagi para pekerja entitas pelapor maupun pekerja dari suatu entitas yang berelasi dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**3. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa/ Pihak Berelasi (Lanjutan)**

- (vi) Entitas tersebut dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Entitas tersebut, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.
- (viii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas tersebut atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas tersebut).

**4. Kas**

Kas meliputi seluruh uang kertas dan logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berada di Kas.

**5. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

**6. Penempatan Pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis.

**7. Kredit**

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit atau baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Bunga kredit *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima. Bunga kredit *non-performing* diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

**8. Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur. Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memenuhi liabilitasnya setelah kredit direstrukturisasi. Cara Restrukturisasi yaitu :

- Modifikasi persyaratan kredit : penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan
- Penambahan fasilitas kredit : *fresh money* atau konversi tunggakan bunga.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Perkreditan Rakyat Pasal 16 bahwa BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing Aset Produktif. Kemudian OJK menetapkan peraturan PPKA dan CKPN dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dalam pasal 19 sebagai berikut :

PPKA Umum :

- 0,50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.

PPKA Khusus :

- 3 % dari seluruh aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan
- 10% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurang dengan nilai agunan.
- 50% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurang dengan nilai agunan.
- 100% dari seluruh aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurang dengan nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA sebagai berikut :

- 85% (delapan puluh lima perseratus) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.
- 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**9. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - (Lanjutan)**

- 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai liabilitas penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat;
- 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; dan
- 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

CKPN dibentuk berdasarkan klasifikasi kualitas aset produktif (Kredit, Penempatan pada Bank Lain, dll), yang umumnya terbagi menjadi:

1. Lancar (*Pass*)
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
3. Kurang Lancar (*Substandard*)
4. Diragukan (*Doubtful*)
5. Macet (*Loss*)

**10. Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari :

1. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi, dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi (jika ada).

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**9. Aset Tetap (Lanjutan)**

Penyusutan Aset tetap dan inventaris :

1. Disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
2. Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan misalnya aset berada dilokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen.
3. Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.96/KMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Prosentase penyusutan/amortisasi sebagai berikut :

NO	Aset Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)	Tarif (%)
I.	Bukan Bangunan :		
	Kelompok 1	4	25%
	Kelompok 2	8	12,5%
	Kelompok 3	16	6,25%
	Kelompok 4	20	5%
II.	Bangunan :		
	Permanen	20	5%
	Tidak Permanen	10	10%

**11. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka (disajikan dalam akun aset lain-lain) diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

**12. Liabilitas Segera Dibayar**

Liabilitas segera merupakan liabilitas BPR kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas BPR.

**13. Utang Bunga**

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

**14 Simpanan**

Giro, tabungan, dan deposito dinyatakan sebesar nilai liabilitas bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal, dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

**15. Pendapatan Bunga**

Pendapatan bunga adalah pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi). Pendapatan bunga diakui menggunakan Metode Suku Bunga Efektif. Berbeda dengan metode garis lurus, metode ini mengalokasikan pendapatan bunga selama jangka waktu aset keuangan sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan atas nilai tercatat aset.

- Pendapatan Bunga Kontraktual: Bunga yang ditagihkan kepada debitur sesuai jadwal angsuran.
- Amortisasi Biaya Transaksi: Biaya perolehan (seperti komisi) dan pendapatan transaksi (seperti biaya provisi/administrasi) harus dikapitalisasi ke dalam nilai tercatat kredit dan diamortisasi sebagai bagian dari pendapatan bunga selama masa kredit.

**16. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16)

**17. Beban Bunga**

- a. Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.
- b. Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, cash back dan hadiah deposito berjangka.
- c. Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.

**18. Pajak Penghasilan**

Beban pajak penghasilan adalah jumlah dari pajak kini terutang dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan) terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1).

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)**

### **18. Pajak Penghasilan**

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1).

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

### **19. Liabilitas Imbalan Kerja**

Liabilitas imbalan kerja merupakan imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos liabilitas segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang didiskontokan.

Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu. Liabilitas imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah didiskonto (*discounted amount*).

PT. BPR NEHEMIA sampai saat ini mengadopsi ketentuan pemberian imbalan pasca kerja sesuai UU No. 11 Tahun 2020 kemudian dirubah kembali dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke dalam peraturan intern perusahaan. Diimplementasikan dengan mencadangkan imbalan pasca kerja sebesar Rp. 374.256.175,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), namun perusahaan belum melakukan pencadangan kembali pada tahun berjalan.

## **3. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN**

### **3.1 Risiko Likuiditas**

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### **3.2 Risiko Kredit**

Salah satu risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat adalah risiko kredit atau credit risk yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi liabilitas untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dalam hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )**

---

**3. MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**3.2 Risiko Kredit (Lanjutan)**

Manajemen risiko kredit yang dilakukan BPR diantaranya dengan :

- a. Pengendalian intern kredit
- b. Alokasi kredit BPR
- c. Analisis permohonan kredit
- d. Penerapan prinsip kehati-hatian

**3.3 Risiko Operasional**

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank. pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

**3.4 Risiko Permodalan**

Risiko Modal adalah risiko yang muncul akibat penurunan kualitas aset, karena adanya kredit macet, yang memaksa bank untuk menerbitkan saham baru dan/atau penambahan setoran modal oleh pemilik, atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan.

**3.6 Risiko Pasar**

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas dimasa depan dari instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar.

- Risiko Nilai Tukar Mata Asing.  
Perseroan mengalami risiko kurs mata uang asing yang timbul dari berbagai mata uang terutama yang berhubungan dengan US Dollar, Euro. Risiko kurs timbul dari transaksi perdagangan dimasa depan, aset yang diakui dan liabilitas serta investasi bersih pada kegiatan operasi. Peningkatan atau penurunan nilai mata uang asing dapat berpengaruh pada laba Perseroan.
- Risiko Tingkat Bunga yang Wajar dan Arus Kas  
Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuatif karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai wajar suku bunga adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.
- Risiko Harga  
Merupakan risiko yang ditanggung oleh investor karena penurunan harga pada saat menjual aset, sehingga jumlah yang diterima akan berkurang. Risiko ini timbul karena tidak adanya kepastian nilai pasar suatu aset atau aset dimasa depan.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>		
<b>1. KAS</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Kas Khasanah	83,461,800	69,880,000
<b>JUMLAH KAS</b>	<b><u>83,461,800</u></b>	<b><u>69,880,000</u></b>
<b>2. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA</b>		
Jumlah tersebut adalah pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit kolektabilitas lancar termasuk penempatan pada bank lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Pendapatan Bunga YAD	247,196,196	153,311,218
<b>JUMLAH PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA</b>	<b><u>247,196,196</u></b>	<b><u>153,311,218</u></b>
<b>3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo penempatan pada bank lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>Penempatan Giro :</b>		
- Giro Bank BCA	46,602,590	84,177,643
<b>JUMLAH PENEMPATAN GIRO</b>	<b><u>46,602,590</u></b>	<b><u>84,177,643</u></b>
<b>Penempatan Tabungan :</b>		
- Tabungan Bank BCA	947,869,429	436,239,138
- Tabungan Bank NISP	81,496,856	212,989,033
- Tabungan Bank PERMATA	24,251,160	114,611,515
- Tabungan Bank MANDIRI BISNIS	101,633,675	174,616,632
- Tabungan Bank BJB	12,579,703	65,456,263
- Tabungan Bank BRI Padalarang	9,213,569	20,002,903
<b>JUMLAH PENEMPATAN TABUNGAN</b>	<b><u>1,177,044,392</u></b>	<b><u>1,023,915,484</u></b>
<b>Penempatan Deposito :</b>		
- Deposito Bank PERMATA	3,500,000,000	10,800,000,000
- Deposito Bank BANTEN	6,500,000,000	2,000,000,000
<b>JUMLAH PENEMPATAN DEPOSITO</b>	<b><u>10,000,000,000</u></b>	<b><u>12,800,000,000</u></b>
<b>JUMLAH PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>	<b><u>11,223,646,983</u></b>	<b><u>13,908,093,127</u></b>
<b>CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PENEMPATAN PADA BANK LAIN</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas penempatan pada bank lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian berdasarkan kualitas aset produktif sebagai berikut :		
- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(50,000,000)	(69,540,466)
<b>JUMLAH PENYISIHAN KERUGIAN</b>	<b><u>(50,000,000)</u></b>	<b><u>(69,540,466)</u></b>
<b>TOTAL PENEMPATAN PADA BANK LAIN SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN KERUGIAN</b>	<b><u>11,173,646,983</u></b>	<b><u>13,838,552,661</u></b>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>4. KREDIT YANG DIBERIKAN</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Kredit Modal Kerja	4,790,702,194	3,618,998,200
- Kredit Multi Guna	5,378,362,737	4,292,059,850
<b>JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN</b>	<b><u>10,169,064,931</u></b>	<b><u>7,911,058,050</u></b>
<b>Rincian Berdasarkan Kolektibilitas</b>		
- Lancar	7,967,115,006	6,189,480,800
- DPK (Dalam Perhatian Khusus)	28,611,039	44,832,800
- Kurang Lancar	144,105,085	82,499,500
- Diragukan	72,317,656	74,942,900
- Macet	1,956,916,145	1,519,302,050
<b>JUMLAH</b>	<b><u>10,169,064,931</u></b>	<b><u>7,911,058,050</u></b>
Provisi & Administrasi	(51,646,925)	(52,556,252)
<b>JUMLAH</b>	<b><u>(51,646,925)</u></b>	<b><u>(52,556,252)</u></b>
<b>JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN</b>	<b><u>10,117,418,006</u></b>	<b><u>7,858,501,798</u></b>
Jumlah Kredit yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa :		
- Terkait	-	-
- Tidak Terkait	10,169,064,931	7,911,058,050
<b>JUMLAH</b>	<b><u>10,169,064,931</u></b>	<b><u>7,911,058,050</u></b>
<b>Informasi Pokok :</b>		
a. Kredit dijamin dengan jaminan tunai (cash colateral) benda bergerak dan atau tidak bergerak dengan pengikatan secara hak tanggungan dan dibawah tangan serta jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.		
b. Tingkat Suku Bunga Kredit Terkait 4.00% - 15.00%, sedangkan tingkat suku bunga kredit tidak terkait 12% - 34%		
c. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Tidak terdapat plafond kredit yang diberikan kepada pihak terkait per 31 Desember 2025.		
d. Pihak Terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.		
<b>CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI KREDIT</b>		
Jumlah tersebut adalah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut :		
- Lancar	-	(394,579,366)
- DPK (Dalam Perhatian Khusus)	(4,876,380)	(3,648,654)
- Kurang Lancar	(95,911,678)	(46,167,600)
- Diragukan	(48,723,228)	(74,542,900)
- Macet	(1,666,300,990)	(1,343,831,450)
<b>JUMLAH</b>	<b><u>(1,815,812,276)</u></b>	<b><u>(1,862,769,970)</u></b>
<b>TOTAL KREDIT YANG DIBERIKAN SETELAH DIKURANGI PENYISIHAN KERUGIAN KREDIT</b>	<b><u>8,353,252,655</u></b>	<b><u>6,048,288,080</u></b>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>			<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>				
<b>5. ASET TETAP</b>				
Rincian Aset Tetap dan Inventaris per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :				
<b>2025</b>				
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Furniture/Mebel	118,274,900	-	-	118,274,900
- Inventaris Kantor	254,202,180	-	-	254,202,180
<b>JUMLAH</b>	<b>372,477,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372,477,080</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Furniture/Mebel	(116,774,846)	(750,000)	-	(117,524,846)
- Inventaris Kantor	(248,826,014)	(2,295,171)	-	(251,121,185)
<b>JUMLAH</b>	<b>(365,600,860)</b>	<b>(3,045,171)</b>	<b>-</b>	<b>(368,646,031)</b>
<b>NILAI BUKU</b>	<b>6,876,220</b>			<b>3,831,049</b>
<b>2024</b>				
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Furniture/Mebel	118,274,900	-	-	118,274,900
- Inventaris Kantor	254,202,180	-	-	254,202,180
<b>JUMLAH</b>	<b>372,477,080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372,477,080</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Furniture/Mebel	(115,274,846)	(1,500,000)	-	(116,774,846)
- Inventaris Kantor	(244,497,586)	(4,328,428)	-	(248,826,014)
<b>JUMLAH</b>	<b>(359,772,432)</b>	<b>(5,828,428)</b>	<b>-</b>	<b>(365,600,860)</b>
<b>NILAI BUKU</b>	<b>12,704,648</b>			<b>6,876,220</b>
<b>6. ASET TIDAK BERWUJUD</b>				
Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :				
<b>2025</b>				
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Software Aplikasi	36,100,000	-	-	36,100,000
<b>JUMLAH</b>	<b>36,100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,100,000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2025</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31 Desember 2025</b>
- Software Aplikasi	(36,099,994)	-	-	(36,099,994)
<b>JUMLAH</b>	<b>(36,099,994)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(36,099,994)</b>
<b>NILAI BUKU</b>	<b>6</b>			<b>6</b>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>		
<b>4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>				
<b>6. ASET TIDAK BERWUJUD (Lanjutan)</b>				
	<b>2024</b>			
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2024</b>		
	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>		
- Software Aplikasi	36,100,000	-		
	-	-		
<b>JUMLAH</b>	<b>36,100,000</b>	<b>36,100,000</b>		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2024</b>		
	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>		
- Software Aplikasi	(36,099,994)	-		
	-	-		
<b>JUMLAH</b>	<b>(36,099,994)</b>	<b>(36,099,994)</b>		
<b>NILAI BUKU</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>7. ASET LAIN-LAIN</b>				
Jumlah tersebut adalah aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
<b>BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b>				
- Pajak Dibayar Dimuka - PPh Pasal 25	-	-		
- Lainnya	1,500,000	455,000		
<b>JUMLAH</b>	<b>1,500,000</b>	<b>455,000</b>		
<b>TOTAL ASET LAIN-LAIN</b>	<b>1,500,000</b>	<b>455,000</b>		
<b>8. ASET PAJAK TANGGUHAN</b>				
Jumlah tersebut adalah Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:				
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
- Penyisihan	-	-	-	-
Penurunan Nilai	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. LIABILITAS SEGERA DIBAYAR</b>				
Jumlah tersebut adalah saldo Liabilitas segera dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
- PPh Pasal 4 Ayat 2	7,922,872	8,921,809		
- PPh Pasal 21	5,852,474	5,757,072		
- PPh Pasal 23	4,765,000	4,476,300		
- Titipan Nasabah	490,471,300	670,187,352		
- Titipan Premi Asuransi/BPJS/ Notaris	3,374,681	3,428,690		
- Lainnya	24,921,598	28,179,045		
<b>JUMLAH LIABILITAS SEGERA DIBAYAR</b>	<b>537,307,925</b>	<b>720,950,268</b>		
<b>10. UTANG BUNGA</b>				
Jumlah tersebut adalah saldo utang bunga per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:				
- Utang Bunga Deposito & Tabungan Yang Masih Harus Dibayar	10,177,398	12,681,095		
<b>JUMLAH UTANG BUNGA</b>	<b>10,177,398</b>	<b>12,681,095</b>		

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>11. UTANG PAJAK</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo utang pajak badan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:		
- PPh Badan Ps 25	4,407,150	2,445,960
<b>JUMLAH UTANG PAJAK</b>	<b><u>4,407,150</u></b>	<b><u>2,445,960</u></b>
Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan, dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :		
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>40,899,063</b>	<b>31,516,704</b>
<b>Koreksi Fiskal</b>		
Cadangan Dana Pendidikan	253,725	(2,500)
Provisi dan Adm Yang Ditangguhkan	(909,326)	(3,799,297)
Jasa Giro	(303,084)	(594,576)
Komisi Asuransi Jiwa	5,124,839	116,240
Denda Pajak	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>4,166,154</u></b>	<b><u>(4,280,133)</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>45,065,217</b>	<b>27,236,571</b>
Jumlah Pendapatan	2,766,125,566	2,515,298,100
<b>Taksiran Hutang Pajak</b>		
Tahun 2025 = 11.00% x 45,065,000 =	4,957,150	
Tahun 2024 = 11.00% x 27,236,000 =		2,995,960
<b>Kredit Pajak :</b>		
PPh Pasal 25	550,000	550,000
<b>Pph Pasal 29 / Kurang Bayar</b>	<b>4,407,150</b>	<b>2,445,960</b>
<b>Pembulatan</b>	<b>4,407,150</b>	<b>2,445,897</b>
<b>12. SIMPANAN</b>		
<b>TABUNGAN</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo tabungan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Tabungan	1,325,638,186	1,387,414,913
<b>JUMLAH</b>	<b><u>1,325,638,186</u></b>	<b><u>1,387,414,913</u></b>
<b>DEPOSITO</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo deposito berjangka per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Deposito Simpanan Nasabah	7,985,000,000	9,061,000,000
- Deposito Simpanan Bank Lain	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b><u>7,985,000,000</u></b>	<b><u>9,061,000,000</u></b>
Rincian Tabungan yg mempunyai hub. istimewa :		
- Terkait	112,201,102	95,292,909
- Tidak Terkait	1,213,437,084	1,292,122,004
<b>JUMLAH</b>	<b><u>1,325,638,186</u></b>	<b><u>1,387,414,913</u></b>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024		
<b>4 INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>				
<b>12. SIMPANAN (Lanjutan)</b>				
Rincian Deposito yg mempunyai hub. istimewa :				
- Terkait	6,800,000,000	6,850,000,000		
- Tidak Terkait	1,185,000,000	2,211,000,000		
<b>JUMLAH</b>	<b>7,985,000,000</b>	<b>9,061,000,000</b>		
<b>TOTAL SIMPANAN</b>	<b>9,310,638,186</b>	<b>10,448,414,913</b>		
<b>13. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA</b>				
Jumlah tersebut adalah saldo Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
- Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>*Lihat Kebijakan Akuntansi poin 2.19</i>	374,256,175	374,256,175		
<b>JUMLAH LIABILITAS IMBALAN KERJA</b>	<b>374,256,175</b>	<b>374,256,175</b>		
<b>14. LIABILITAS LAIN-LAIN</b>				
Jumlah tersebut adalah saldo iabilitas lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
- Dana Pendidikan	4,144,725	3,891,000		
- Titipan Komisi Asuransi	9,440,289	4,315,450		
<b>JUMLAH LIABILITAS LAIN-LAIN</b>	<b>13,585,014</b>	<b>8,206,450</b>		
<b>15. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN</b>				
Jumlah tersebut adalah Liabilitas Pajak Tangguhan per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
- Selisih Depresiasi Aset Tetap	-	-	-	-
- Selisih Penyisihan Penurunan Nilai	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-
<b>16. MODAL SAHAM</b>				
Susunan Pemegang Saham perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :				
<b>2025</b>				
<b>Pemegang Saham 2025</b>	<b>Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor</b>	<b>Prosentase Kepemilikan</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	
Robinson Sitorus	304	76.00%	1,520,000,000	
Edrianto Sitorus	96	24.00%	480,000,000	
<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>2,000,000,000</b>	
<b>MODAL</b>				
Jumlah tersebut adalah saldo modal per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :				
- Modal Saham	2,000,000,000	2,000,000,000		
<b>JUMLAH MODAL SAHAM</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>		

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4 INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>17. SALDO LABA</b>		
- Cadangan Umum	403,000,000	403,000,000
- Laba (Rugi) Tahun Lalu	6,094,852,072	6,076,533,334
- Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu atas Pendapatan Bunga	(2,169,214)	(10,202,006)
- Koreksi Perubahan SAK ETAP Ke SAK EP *	1,029,245,144	
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak	35,941,914	28,520,744
- Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	-
<b>JUMLAH SALDO LABA</b>	<b><u>7,157,869,915</u></b>	<b><u>6,497,852,072</u></b>
* Perusahaan telah menerapkan SAK EP secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam standar tersebut dengan melakukan koreksi atas laba (rugi) tahun lalu sebesar Rp 1.027.075.930,-. Namun perusahaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip dasar retrospektif, karena perusahaan belum menyajikan kembali laporan keuangan dengan angka komparatif tahun sebelumnya agar selaras dengan persyaratan SAK EP.		
<b>18 PENDAPATAN OPERASIONAL</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo pendapatan operasional per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>PENDAPATAN BUNGA</b>		
<b>A. BUNGA KONTRAKTUAL</b>		
<b>PENEMPATAN PADA BANK LAIN :</b>		
- Pendapatan Bunga Dari Tabungan	1,906,068	3,890,088
- Pendapatan Bunga Dari Deposito	696,199,873	691,766,432
- Pendapatan Bunga Dari Jasa Giro	26,885	69,541
<b>JUMLAH</b>	<b><u>698,132,826</u></b>	<b><u>695,726,061</u></b>
<b>PIHAK KETIGA BUKAN BANK:</b>		
- Pendapatan Bunga Kredit Bukan Bank	1,789,214,708	1,690,535,700
<b>JUMLAH</b>	<b><u>1,789,214,708</u></b>	<b><u>1,690,535,700</u></b>
<b>JUMLAH BUNGA KONTRAKTUAL</b>	<b><u>2,487,347,534</u></b>	<b><u>2,386,261,761</u></b>
<b>B. PROVISI KREDIT</b>		
- Bunga Dari Provisi Kredit	92,463,974	87,417,296
<b>JUMLAH</b>	<b><u>92,463,974</u></b>	<b><u>87,417,296</u></b>
<b>TOTAL PENDAPATAN BUNGA</b>	<b><u>2,579,811,508</u></b>	<b><u>2,473,679,057</u></b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
- Pendapatan Administrasi Tabungan & Deposito	16,117,077	31,750,211
- Pendapatan Denda	4,772,600	2,080,250
- Pendapatan Penerimaan Aset Produktif Yang Dihapus Buku	54,645,700	1,693,500
- Pemulihan CKPN	101,790,451	-
- Lainnya	8,988,230	6,095,082
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	<b><u>186,314,058</u></b>	<b><u>41,619,043</u></b>
<b>TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b><u>2,766,125,566</u></b>	<b><u>2,515,298,100</u></b>
<b>19. BEBAN BUNGA</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo beban bunga yang diperoleh dari kegiatan usaha per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>PIHAK KETIGA BUKAN BANK</b>		
- Beban Bunga Tabungan	15,032,657	14,879,542
- Beban Bunga Deposito Berjangka	500,575,138	513,922,947

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
JUMLAH	<u>515,607,795</u>	<u>528,802,489</u>
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	<u>2,250,517,771</u>	<u>1,986,495,611</u>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4 INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>20 BEBAN OPERASIONAL</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo beban operasional yang diperoleh dari kegiatan usaha per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>1. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo beban penyisihan kerugian atau penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Beban PPAP ABA	-	-
- Beban PPAP Kredit Yang Diberikan	119,099,729	-
<b>JUMLAH</b>	<u><b>119,099,729</b></u>	<u><b>-</b></u>
* BPR tidak melakukan beban penyisihan penghapusan aset produktif pada tahun berjalan karena BPR telah memenuhi PPAP yang wajib dibentuk pada periode 31 Desember 2024.		
<b>2. BEBAN PEMASARAN</b>		
- Beban Iklan dan Promosi	1,080,536	1,422,880
<b>JUMLAH</b>	<u><b>1,080,536</b></u>	<u><b>1,422,880</b></u>
<b>3. BEBAN ADMINISTRASI UMUM</b>		
<b>a. Beban Tenaga Kerja</b>		
- Beban Gaji dan Honorarium	843,560,028	884,120,116
- Beban Tenaga Kerja Lainnya	75,617,482	59,770,700
<b>JUMLAH</b>	<u><b>919,177,510</b></u>	<u><b>943,890,816</b></u>
<b>b. Beban Penelitian dan Pengembangan</b>		
- Beban Pendidikan & Pelatihan	120,333,725	53,997,500
<b>JUMLAH</b>	<u><b>120,333,725</b></u>	<u><b>53,997,500</b></u>
<b>c. Beban Sewa</b>		
- Beban Sewa	759,000,000	686,000,000
<b>JUMLAH</b>	<u><b>759,000,000</b></u>	<u><b>686,000,000</b></u>
<b>Informasi Pokok Beban Sewa :</b>		
1. Nomor Surat : 01/SM/KA/I/2025		
Produk Sewa : Kendaraan		
Jangka Waktu : 01 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025		
Jumlah Sewa : Rp.19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus rupiah) per bulan tidak termasuk Pph 23		
Jumlah unit : 4 (empat) unit		
2. Nomor Surat : Tidak ada nomor surat		
Produk Sewa : Gedung		
Jangka Waktu : 03 Januari 2025 s.d 02 Januari 2026		
Jumlah Sewa : Rp. 525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun tidak termasuk Pph 23		
Jumlah unit : 1 (satu) unit		
Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 546, Bandung		

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 DESEMBER 2025</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
<b>4 INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>3. BEBAN ADMINISTRASI UMUM (Lanjutan)</b>		
<b>d. Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi</b>		
- Beban Penyusutan Meubeul	750,000	1,500,000
- Beban Penyusutan Inventaris Kantor	2,295,171	4,328,428
<b>JUMLAH</b>	<b><u>3,045,171</u></b>	<b><u>5,828,428</u></b>
<b>e. Beban Premi Asuransi</b>		
- Premi Asuransi	75,789,918	70,249,706
<b>JUMLAH</b>	<b><u>75,789,918</u></b>	<b><u>70,249,706</u></b>
<b>f. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan</b>		
- Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris Kantor	5,365,000	3,970,500
<b>JUMLAH</b>	<b><u>5,365,000</u></b>	<b><u>3,970,500</u></b>
<b>g. Beban Barang dan Jasa</b>		
- Beban Barang dan Jasa dari pihak ketiga lainnya	136,354,756	119,634,062
<b>JUMLAH</b>	<b><u>136,354,756</u></b>	<b><u>119,634,062</u></b>
<b>h. Beban Pajak</b>		
- Beban Pajak Lainnya	57,061,586	54,634,086
<b>JUMLAH</b>	<b><u>57,061,586</u></b>	<b><u>54,634,086</u></b>
<b>TOTAL BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM</b>	<b><u>2,076,127,666</u></b>	<b><u>1,938,205,098</u></b>
<b>4. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA</b>		
- Beban Administrasi Umum Lainnya	13,310,777	15,350,929
<b>JUMLAH</b>	<b><u>13,310,777</u></b>	<b><u>15,350,929</u></b>
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b><u>2,089,438,443</u></b>	<b><u>1,953,556,027</u></b>
<b>21. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo pendapatan dan beban non operasional yang diterima dan dikeluarkan tahun 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>a. PENDAPATAN NON OPERASIONAL</b>		
- Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>b. BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
- Beban Non Operasional	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>22. BEBAN TAKSIRAN PAJAK</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo Beban Taksiran Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Taksiran Pajak Penghasilan	4,957,150	2,995,960
- Pendapatan Pajak Tangguhan	-	-
<b>JUMLAH BEBAN TAKSIRAN PAJAK</b>	<b><u>4,957,150</u></b>	<b><u>2,995,960</u></b>

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
<b>4 INFORMASI YANG Mendukung POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)</b>		
<b>23. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Jumlah tersebut adalah saldo Penghasilan Komprehensif lainnya per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :		
<b>Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap (Neto)	-	-
- (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial manfaat pasti		
- Lainnya		
<b>Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>		
- Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual		
- Lainnya		
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	-	-

**INFORMASI TAMBAHAN**

**a. REKENING ADMINISTRATIF**

Bunga dalam penyelesaian	229,966,126,109	128,105,357,150
Aset Produktif yang dihapusbukukan	4,681,317,875	4,735,551,725
Jumlah	<b>234,647,443,984</b>	<b>132,840,908,875</b>

**b. PENERAPAN AWAL SAK EP**

**1) Standar Akuntansi Baru yang Diterapkan**

Efektif 1 Januari 2025, Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Penerapan SAK EP menggantikan SAK sebelumnya yang berlaku bagi entitas privat.

**2) Dasar Transisi**

Perusahaan telah menerapkan SAK EP secara retrospektif sesuai dengan ketentuan transisi yang diatur dalam standar tersebut, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip dasar retrospektif, karena perusahaan belum menyajikan kembali laporan keuangan dengan angka komparatif tahun sebelumnya agar selaras dengan persyaratan SAK EP.

**3) Pengaruh terhadap Laporan Keuangan**

Penerapan SAK EP tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas Perusahaan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan evaluasi atas pos-pos yang sebelumnya diukur, diakui, dan diungkap berdasarkan standar akuntansi yang berlaku sebelum penerapan SAK EP.

**c. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK**

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang berakhirnya tugas dan penutupan BPPN, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004, Pemerintah Indonesia membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, sebuah institusi baru yang menggantikan BPPN, untuk melanjutkan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah atas LIABILITAS pada Bank lokal. dan untuk pelaksanaan program Penjaminan tersebut Pemerintah membentuk lembaga Independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 pada tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah membebankan Premi berkaitan dengan Program penjaminan tersebut sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan simpanan dalam setiap periode yang dibayar 2(dua) kali setahun. Undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU RI No. 7 Th 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No.3 2008 tentang Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

**PT. BPR NEHEMIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

31 DESEMBER 2025

31 DESEMBER 2024

**d. PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN ANTI PENCUCIAN UANG**

Dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Indonesia menerbitkan peraturan No. 5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pengenalan "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)".

Prinsip Mengenal Nasabah adalah Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui Identitas Nasabah, memantau transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sesuai peraturan tersebut, Bank wajib memiliki sistem Informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya transaksi mencurigakan dan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi "KYC"/*Know Your Customer Principles* (Prinsip Mengenal Nasabah) berubah menjadi terminologi "CDD"/Customer Due Dilligence.

Dengan menerapkan program Customer Due Dilligence berarti Bank bertujuan meminimalkan resiko yang mungkin timbul yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan CDD dan Program APU PPT, dengan membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

RASIO TINGKAT KESEHATAN BANK

PT. BPR NEHEMIA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

LAMPIRAN I

Kriteria Tingkat Kesehatan		Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024		
<b>I. PERMODALAN</b>					
CAR =	Jumlah Modal	9,479,502,788	126.36%	8,570,559,195	123.19%
	A T M R	7,502,253,814		6,957,399,601	
<b>II. KUALITAS ASET PRODUKTIF</b>					
KAP =	Aset Produktif yg diklasifikasikan	2,082,555,471	9.76%	1,616,758,975	7.41%
	Jumlah Aset Produktif	21,341,064,989		21,819,151,177	
<b>III. EARNING / RENTABILITAS</b>					
ROA =	Laba / Rugi Berjalan	40,899,063	0.20%	31,516,704	0.16%
	Total Aset	20,547,031,825		20,064,806,933	
BOPO =	Beban Operasional	2,725,226,503	98.52%	2,483,781,396	98.75%
	Pendapatan Operasional	2,766,125,566		2,515,298,100	
ROE =	Laba Setelah Pajak	35,941,914	1.80%	28,520,744	1.43%
	Modal Inti	2,000,000,000		2,000,000,000	
<b>IV. LIKUIDITAS / LIQUIDITY</b>					
Cash Rasio =	Alat Liquid	1,307,108,783	12.75%	1,177,973,127	10.18%
	Utang Lancar	10,250,371,848		11,566,954,861	
LDR =	Kredit yang diberikan	10,117,418,006	108.67%	7,911,058,050	41.79%
	Dana yang diterima	9,310,638,186		18,932,006,613	
<b>V. NPL (Net Performing Loan)</b>					
NPL Gross =	Kolektibilitas (KL +D + M)	2,172,278,997	21.47%	1,676,744,450	21.19%
	Kredit yang diberikan	10,117,418,006		7,911,058,050	
NPL Netto =	Kolektibilitas (KL +D + M)-PPKA	361,343,101	3.57%	208,614,300	2.64%
	Kredit yang diberikan	10,117,418,006		7,911,058,050	
<b>VI. Rasio PPAP terhadap PPAPWD</b>					
<b>VII. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit)</b>					
1	Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait	10%	956,691,754		
2	Pemberian fasilitas kredit kepada pihak tidak terkait	20%	1,913,383,509		
3	Pemberian fasilitas kredit kepada kelompok peminjam	30%	2,843,850,836		
Berdasarkan hasil analisa kami dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK, baik untuk Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait maupun Kelompok Peminjam					

<b>Kode Form</b>	<b>: Form C.02.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Opini Akuntan Publik</b>	<b>Nama Akuntan Publik</b>
Wajar Dengan Pengecualian	Mochamad Rivai, SE., Ak, CA., CPA

<b>Kode Form</b>	<b>: Form D.00.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>



# PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NEHEMIA

Jl. Raya Padalarang No. 546 Telp. (022) 6809121 – Fax. (022) 6808456  
Padalarang 40553, Kabupaten Bandung Barat

## SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Tentang  
**TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
PT. BPR NEHEMIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edrianto Sitorus  
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR NEHEMIA  
Alamat : Jl. Raya Padalarang No. 546 Kab. Bandung Barat

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA
2. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan Keuangan PT. BPR NEHEMIA tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggungjawab atas Sistem Pengendalian Intern dalam PT. BPR NEHEMIA

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padalarang, 28 April 2026

**PT. BPR NEHEMIA**



**Edrianto Sitorus**  
Direktur Utama

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.01.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>Deskripsi</b>	<b>Keterangan</b>
Alamat	: Jl. Raya Padalarang No. 546
No. Telepon	: (022)6809121
Penjelasan Umum	: Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR semakin meningkat, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 9/POJK.03/2024 tanggal 14 Juni 2024, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024, tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola antara lain : Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran serta menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, hal ini mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh BPR Nehemia, yang terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola atau GCG. BPR menilai bahwa GCG sudah saatnya untuk di laksanakan, mengingat bahwa BPR sebagai

	salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di wilayah kerja BPR.
Peringkat Komposit Hasil : Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola	Peringkat : Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.02.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: *****
	Nama	: Edrianto Sitorus
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mengetahui Komisaris.</li> <li>• Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li> <li>• Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Direksi telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>• Dalam rangka mendukung terselenggaranya GCG, Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.</li> <li>• Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja,</li> </ul>

	waktu kerja dan peraturan rapat.	
2	NIK	: *****
	Nama	: Nimas Ayu Pamungkas
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan <i>Job Description</i> (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mengetahui Komisaris.</li> <li>• Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</li> <li>• Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Direksi telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>• Dalam rangka mendukung terselenggaranya GCG, Direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional.</li> <li>• Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ektern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.</li> </ul>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
Direksi telah menindaklanjuti sebagian besar Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR, Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Audit ekstern yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR sebagimnana rekomendasi Dewan Komisaris yang dituangkan dalam RUPS BPR, Mengetahui Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komisaris, Mengetahui Pembagian Tugas, Wewenang & Tanggungjawab		

Direksi, Mengetahui RBB tahun 2026, Mengetahui berbagai Kebijakan/Keputusan Direksi dalam operasional dan kredit, sebagai acuan Direksi dalam menjalankan bisnis BPR. Adapun Pembentukan Pejabat Eksekutif APU&PPT, Managemen Risiko dan Kepatuhan, belum dapat ditindak lanjuti kembali pasca pengunduran diri pejabat eksekutif dimaksud.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.02.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	NIK	: *****
	Nama	: Rosi Rostianti
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan saran kepada Direksi.</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.</li> <li>• Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan otoritas jasa Keuangan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen.</li> <li>• Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penyediaan dana kepada pihak terkait</li> <li>➢ Memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul> </li> </ul>
2	NIK	: *****
	Nama	: Pahala Silitonga
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.</li> <li>• Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan saran kepada Direksi.</li> <li>• Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.</li> <li>• Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi</li> </ul>

	<p>menindaklanjuti hasil temuan otoritas jasa Keuangan sesuai dengan periode pemenuhan komitmen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal :<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Penyediaan dana kepada pihak terkait</li><li>➢ Memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</li></ul></li></ul>
<p>Rekomendasi Kepada Direksi :</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Pejabat Eksekutif APU&amp;PPT, Managemen Risiko dan Kepatuhan serta Internal Audit</li><li>• Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR.</li><li>• Mengetahui calon Penyedia Jasa Pengadaan Audit ekstern yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPR.</li><li>• Mengetahui Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Komisaris.</li><li>• Mengetahui Pembagian Tugas, Wewenang &amp; Tanggungjawab Direksi.</li><li>• Mengetahui RBB tahun 2026</li><li>• Mengetahui berbagai Kebijakan/Keputusan Direksi dalam operasional dan kredit, sebagai acuan Direksi dalam menjalankan bisnis BPR.</li></ul>	

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.02.03</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>No.</b>	<b>Program Kerja dan realisasi Program Kerja Komite</b>
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5	Komite Lainnya
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

Modal inti BPR sampai dengan akhir tahun 2025 kurang dari Rp. 50.000.000,- ribu (lima puluh milyar), oleh karena itu BPR belum membentuk fungsi komite-komite.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.02.04</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tdk)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	

Modal inti BPR sampai dengan akhir tahun 2025 kurang dari Rp. 50.000.000,- ribu (lima puluh milyar), oleh karena itu BPR belum membentuk fungsi komite-komite.

PT BPR NEHEMIA

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.03.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	NIK	Nama	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
<b>Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR</b>						
1	*****	Edrianto Sitorus	480.000.000	24,00	480.000.000	24,00
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	0	0	0	0
<b>Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR</b>						
1	*****	Rosi Rostianti	0	0	0	0
2	*****	Pahala Silitonga	0	0	0	0

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.03.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

<b>No.</b>	<b>NIK</b>	<b>Nama</b>	<b>Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%)</b>	<b>Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya</b>
1	*****	Edrianto Sitorus	-	0	0
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	0	0
3	*****	Rosi Rostianti	-	0	0
4	*****	Pahala Silitonga	-	0	0

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada Kelompok Usaha.

PT BPR NEHEMIA

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.03.03</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	NIK	Nama	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	*****	Edrianto Sitorus	-	-	0
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	-	0
3	*****	Rosi Rostianti	-	-	0
4	*****	Pahala Silitonga	-	-	0

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham pada perusahaan lain.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.04.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
<b>Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR</b>					
1	*****	Edrianto Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Hubungan Keuangan Anggota Dewan komisaris pada BPR</b>					
1	*****	Rosi Rostianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Pahala Silitonga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR</b>					
1	*****	Robinson Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	*****	Edrianto Sitorus	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Anggota Direksi BPR NEHEMIA tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, maupun dengan Pemegang Saham BPR. Anggota Dewan Komisaris BPR NEHEMIA tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi lainnya, ataupun dengan Pemegang Saham BPR.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.04.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>
<b>Laporan</b>	

No.	NIK	Nama	Hubungan Keluarga		
			I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Pemegang Saham
<b>Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR</b>					
1	*****	Edrianto Sitorus	-	-	Edrianto Sitorus-Robinson Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Edrianto Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Robinson Sitorus.
2	*****	Nimas Ayu Pamungkas	-	-	-
<b>Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR</b>					
1	*****	Rosi Rostianti	-	-	-
2	*****	Pahala Silitonga	-	-	-
<b>Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR</b>					
1	*****	Robinson Sitorus	Robinson Sitorus - Edrianto Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Robinson Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Edrianto Sitorus.	-	-
2	*****	Edrianto Sitorus	-	-	Edrianto Sitorus-Robinson Sitorus, memiliki hubungan keluarga, dimana Bapak Edrianto Sitorus merupakan Saudara Kandung dari Bapak Robinson Sitorus.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.05.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PAKET/ KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Thn)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	320.700.000	2	141.600.000
2	Tunjangan	2	35.926.661	2	21.001.661
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Remunerasi</b>		356.662.661		162.601.661
	<b>Fasilitas Lain</b>				
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
	<b>Total Fasilitas Lain</b>		0		0
	<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		356.662.661		162.601.661

Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan RUPS

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.06.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Keterangan	Perbandingan
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.12
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3.11
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.17
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4.60

Besaran Gaji minimum yang diberikan kepada pegawai BPR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.07.01</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	17/04/2025	4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan dan pemenuhan ketentuan baru terkait CKPN, Nomenklatur &amp; Coretax DJP di BPR NEHEMIA;</li><li>• Tindak Lanjut Exit Meeting PT. BPR NEHEMIA;</li><li>• Penunjukan KAP dan AP tahun 2025;</li><li>• Evaluasi Realisasi Agenda Risalah Rapat periode sebelumnya;</li><li>• Evaluasi/ Penetapan kebijakan Strategis BPR;</li><li>• Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR</li></ul>
2	23/06/2025	4	Penetapan Struktur Gaji dan Fasilitas bagi para Anggota Direksi
3	22/07/2025	4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isu-isu strategis BPR;</li><li>• Pemantauan tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris;</li><li>• Pengawasan Apu PPT dan PPPSPM;</li><li>• Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;</li><li>• Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR</li></ul>
4	23/10/2025	4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisi SOP Tatakelola dan Perlindungan Konsumen;</li><li>• Penanganan Kredit Bermasalah;</li><li>• Kekosongan Jabatan dalam Struktur Organisasi BPR;</li><li>• Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR</li></ul>
5	11/12/2025	4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluasi kebijakan dan strategi BPR,</li><li>• Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR tahun 2025,</li><li>• Rencana Bisnis BPR 2026</li></ul>

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.07.02</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	*****	Rosi Rostianti	5	0	100.00
2	*****	Pahala Silitonga	5	0	100.00

Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.08.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Berkaitan dengan Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit BPR NEHEMIA selama tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan atau fraud, pencegahan fraud dilakukan BPR dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja lain yang terkait, dengan demikian dapat mencegah terjadinya fraud sedini mungkin.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.09.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Uraian Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tidak terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh BPR Nehemia, selama tahun 2025, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.10.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

No.	Pihak yang Memiliki Benturan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	*****	Edrianto Sitorus	Direktur Utama	*****	Edrianto Sitorus	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	525	Jenis Transaksi belum sesuai dengan ketentuan interan
2	*****	Edrianto Sitorus	Direktur Utama	*****	Nimas Ayu Pamungkas	Direktur	Sewa Kendaraan	234	Jenis Transaksi sesuai dengan ketentuan interan, pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak ada keterkaitan

Jika terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak diperkenankan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan, dalam hal pengambilan keputusan, BPR terlebih dahulu menggunakan jasa penilai sebagai acuan penetapan harga atau melakukan perbandingan harga barang sejenis, dengan demikian BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

<b>Kode Form</b>	<b>: Form E.11.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	-	-	-	-

Dalam rencana bisnis BPR tidak menghususkan atau membuat target anggaran perihal dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila BPR menerima proposal permohonan dana untuk penyelenggaraan suatu kegiatan, terlebih dahulu BPR melakukan analisa kelayakan profosal dimaksud, adapun kaitannya dengan kegiatan politik, BPR tidak berpartisipasi, BPR turut berpartisipasi menyukseskan program Literasi Edukasi serta inklusi keuangan yang secara khusus diarahkan pada pengembangan pengetahuan masyarakat di bidang perbankan, yang merupakan Program pencanangan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk kepedulian untuk turut serta mendidik masyarakat agar lebih mengenal perbankan. Rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud telah tertuang dalam RBB BPR Tahun 2025, akan tetapi dalam pelaksanaannya rencana tersebut tidak dapat direalisasikan .

<b>Kode Form</b>	<b>: Form F.00.00</b>
<b>Nama Form</b>	<b>: DOKUMEN PENDUKUNG</b>
<b>Nama LJK</b>	<b>: PT. BPR NEHEMIA</b>
<b>Posisi Laporan</b>	<b>: 31 DESEMBER 2025</b>

L A P O R A N  
PENILAIAN SENDIRI  
TATA KELOLA YANG BAIK  
(SELF ASSESMENT GCG)  
TAHUN 2025  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
**Nehemia**

## Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

### Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Nehemia
Alamat BPR	Jl. Raya Padalarang No. 546 Kab. Bandung Barat
Posisi Laporan	Desember, 2024
Modal Inti BPR	Rp 9.477.333.574,65
Total Aset BPR	Rp 19.811.241.764,15
Bobot Faktor BPR	B

## A. Faktor 1 (Aspek Pemegang Saham)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
A	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		1,5
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Struktur Pemegang Saham telah sesuai dengan Akta Notaris Indirawati Hayuningtyas, SH. No. 85 tanggal 21 September 2022 dan telah ditata usahakan dalam Administrasi Pengawasan OJK No. S.232/KR.0212/2022 tanggal 21 November 2022, sehingga komposisi pemegang saham BPR menjadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinson Sitorus 76 %</li> <li>• Edrianto Sitorus 24 %</li> </ul> dari jumlah modal disetor sebesar Rp. 2 milyar.	1
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis namun perencanaan pengembangan BPR belum sepenuhnya terealisasikan yang tercermin pada kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.	2
B	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,2
1	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, salah satunya melalui RUPS Tahunan yang merupakan pertanggung jawaban Direksi dan Komisaris dalam mengelola BPR dalam periode satu tahun dan pertemuan-pertemuan non formal.	2
2	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan Pemegang Saham terhadap perkembangan BPR melalui laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada para Pemegang Saham, atas hasil-hasil yang diperoleh BPR selama periode tertentu, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan BPR pada periode tertentu.	2
3	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham mendukung pengembangan BPR atas perencanaan permodalan BPR, tercermin dari penundaan penarikan deviden untuk memenuhi permodalan BPR, sebagaimana diatur dalam RUPS BPR.	2
4	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3
5	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan dan menampung, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh Pemegang Saham.	2

C	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		2,25
1	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Hak dan perlakuan Pemegang saham telah diatur dalam anggaran dasar dan RUPS, tercermin dari kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	2
2	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Permodalan BPR sebagai penunjang perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
3	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3
4	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
A	<b>A. Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	Struktur pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Faktor Negatif	-
B	<b>B. Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Pemegang Saham mendukung pengembangan BPR
2	Faktor Negatif	-
C	<b>C. Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Setiap Pemegang Saham diperlakukan Secara Adil
2	Faktor Negatif	-
D	<b>Nilai Faktor</b>	2

## B. Faktor 2 (Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Direksi)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		1,89
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Modal Inti BPR kurang dari 50 M, BPR memiliki dua orang anggota Direksi, salah satu anggota Direksi membawahi fungsi kepatuhan sbb : 1. Edrianto Sitorus (Direktur Utama) sebagai Direktur Bisnis 2. Nimas Ayu Pamungkas (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan)	1
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat	1
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi PT BPR Nehemia tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi belum dapat direalisasikan kembali, diantaranya pembentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Akan tetapi proses pemenuhan tetap diupayakan melalui pembukaan loker.	3
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencantumkan antara lain : Persyaratan menjadi anggota Direksi, Ketentuan jabatan rangkap anggota Direksi, Independensi (kemandirian) anggota Direksi, Prosedur pengangkatan anggota Direksi, Komposisi Direksi, Fungsi Direksi, Tugas dan kewajiban Direksi, Masa jabatan anggota Direksi, Fasilitas Direksi, Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Direksi, Waktu Kerja anggota Direksi, Rapat Direksi, yang mengacu pada Anggaran Dasar BPR.	2
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menetapkan remunerasi bagi pegawai tetap, serta mengevaluasi secara berkala pemberian remunerasi bagi pegawai kontrak setiap perpanjangan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Kondisi dimaksud tidak ada di BPR Nehemia, kecuali penyedia jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)	2

9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Hal dimaksud telah dilakukan Dewan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,31
1	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Tugas dan tanggungjawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Tata tertib Direksi, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan independen. Terkait pengalihan tugas dan wewenang, apabila direksi berhalangan hadir maka tugas dengan batasan tertentu diberikan kepada bagian terkait sesuai dengan kewenangannya, dan tetap mengkomunikasikan dengan Direksi atas keputusan yang diambil.	2
2	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Kondisi dimaksud belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena belum terpenuhinya STO BPR di antaranya mengangkat kembali PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan setelah yang bersangkutan mengundurkan diri. Upaya pemenuhan kembali telah dilakukan BPR, namun belum dapat direalisasikan.	3
3	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Temuan audit telah ditindak lanjuti, Adapun temuan OJK sehubungan dengan pemenuhan struktur organisasi belum dapat ditindaklanjuti. Namun demikian upaya pemenuhan kembali telah dilakukan BPR, dengan melakukan rekrutmen namun belum dapat direalisasikan.	3
4	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	2
5	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didokumentasikan.	2
6	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat sebelum rapat ditutup.	2

7	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dalam hal ini seluruh kegiatan operasional BPR telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian pula dalam hal penyediaan barang dan jasa telah di atur dalam SOP BPR.	2
8	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Hal dimaksud telah dilakukan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan.	2
9	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan kepegawaian diatur dalam Peraturan Perusahaan BPR dan telah disampaikan pada seluruh pegawai sejak pertama kali bergabung dengan BPR, dan pada keputusan Direksi serta arahan-arahan Direksi.	3
10	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Terdapat kepemilikan saham oleh Anggota Direksi sebesar 24 % dari modal disetor yang dimiliki oleh Direktur Utama (Edrianto Sitorus), dan ada hubungan keluarga dengan pemegang saham BPR (Robinson Sitorus).	2
11	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan menerapkan langkah-langkah strategi serta keputusan untuk peningkatan kinerja BPR.	3
12	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Kondisi dimaksud telah dilakukan, dimana dalam pengelolaan operasional BPR, Direksi berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta tata tertib kerja anggota Direksi yang dievaluasi setiap ada perubahan ketentuan.	2
1	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Evaluasi kebijakan remunerasi telah dilakukan oleh Direksi terhadap pegawai BPR, khususnya pegawai kontrak mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		<b>2,17</b>
1	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS, yang diselenggarakan setiap satu tahun sekali, terakhir BPR Nememia telah menyelenggarakan RUPS dimaksud pada tanggal 24 April 2025.	2
2	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR. dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang telah ditetapkan BPR	2

*PT BPR NEHEMIA*

3	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Seluruh Keputusan Direksi di buat dalam bentuk SK Direksi dan telah didokumentasikan, yang akan digunakan sebagai acuan Direksi dalam pengelolaan BPR yang melibatkan seluruh lini organisasi BPR, guna mencapai tujuan usaha.	2
4	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi telah didokumentasikan akan tetapi belum seluruhnya dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Direksi	3
5	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Hal dimaksud telah dilakukan Dewan Direksi melalui keikutsertaannya dalam pelatihan dan pendidikan serta mengikuti perkembangan terkini atas perubahan regulasi terkait usaha perbankan, Demikian juga pengembangan SDM BPR diberikan terhadap seluruh karyawan secara berkelanjutan dengan memperhatikan azas skala prioritas, dengan materi pendidikan dan pelatihan mengacu pada Rencana Bisnis BPR, sesuai dengan kebutuhan BPR, teknik penyampaian pelatihan melalui in house training atau lembaga pendidikan ekstern.	2
6	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan GCG disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi BPR di Indonesia	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	Jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan
2	Faktor Negatif	Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia untuk struktur organisasi, yaitu belum di tunjuknya Pejabat Eksekutif MR dan Kepatuhan
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Secara umum tata Kelola Direksi telah dilaksanakan sesuai POJK
2	Faktor Negatif	Direksi belum optimal dalam pemenuhan temuan OJK, yaitu pemenuhan STO.
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Secara umum hasil tata Kelola direksi telah dilaksanakan sesuai POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

### C. Faktor 3 (Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Komisaris)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		1,38
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan Modal Inti BPR Nehemia kurang dari 50 M memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari Komisaris Utama (Rosi Rostianti) dan anggota Dewan Komisaris (Pahala Silitonga), keduanya merupakan Dewan Komisaris independen.	1
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.	1
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencantumkan antara lain : persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris, Ketentuan jabatan rangkap anggota Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Gaji dan Fasilitas Dewan Komisaris, yang mengacu pada Anggaran Dasar BPR.	2
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan apapun.	1
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR tidak memiliki hubungan dimaksud, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, dan telah diangkat kembali melalui RUPSLB pada tanggal 19-09-2022 selanjutnya di buat Akta Notarisnya pada tanggal 24 September 2022 No. 85 oleh Notaris Indirawati Hayuningtyas, SH yang berkedudukan di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan telah tercatat dalam administrasi OJK melalui surat OJK No. S-3/KR.,021/2023 tanggal 06 Januari 2023, serta memiliki Sertifikat Kompetensi Komisaris dari BNSP pada tanggal 26 November 2025 (berlaku 3 tahun)	1

8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi sebagaimana diatur dalam RUPS BPR yang berbunyi "Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lain bagi Direksi." Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dibuat berita acara Rapat Komisaris. Adapun remunerasi Dewan Komisaris telah diatur dalam RUPS BPR.	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,15
1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana dimaksud, dan hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris. sebagaimana ketentuan yang berlaku.	2
2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ranahnya telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, baik formal dalam bentuk Risalah Rapat Komisaris maupun formal dalam bentuk arahan-arahan.	2
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Hal ini telah di atur dalam SOP Kredit BPR Nehemia, poin 3.4.2. tentang batas wewenang persetujuan kredit, no. 3, bahwa untuk pemberian kredit kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka Dewan Komisaris turut serta dalam pengambilan keputusan.	2
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan sebagian besar hasil temuan OJK dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada OJK	3
5	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Permasalahan yang dihadapi BPR sampai saat ini, terkait melambatnya perkembangan kinerja BPR, Direksi telah memberikan penjelasan dan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya, hal ini telah dikoordinasikan dan menjadi agenda rapat internal BPR, baik dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris maupun rapat Direksi dengan seluruh karyawan, untuk memperoleh langkah-langkah strategi yang tepat.	2

*PT BPR NEHEMIA*

6	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Kondisi dimaksud telah dilakukan, dimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta tata tertib kerja Dewan Komisaris yang dievaluasi setiap ada perubahan ketentuan.	3
7	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, hasil rapat telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat komisaris	2
8	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris telah direlenggarakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, hasil rapat telah didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat Komisaris, yang mana keputusan rapat ditetapkan dari hasil musyawarah untuk mencapai mufakat seluruh peserta rapat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	2
9	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Dalam hal ini seluruh kegiatan operasional BPR telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Demikian pula dalam hal penyediaan barang dan jasa telah di atur dalam SOP BPR.	2
10	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, dan sebagian besar hasil temuan OJK dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada OJK. Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas tugas Direksi serta memberikan nasihat dan arahan dalam pelaksanaannya. Adapun tindak lanjut Direksi atas hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagian besar dapat direalisasikan.	2
11	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sehubungan dengan modal onti yang dimiliki BPR, maka BPR tidak membentuk komite remunerasi dan nominasi sehingga terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. mengacu kepada keputusan RUPS.	2
12	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Terkait dengan modal inti yang dimiliki BPR, maka BPR tidak membentuk komite.	2
13	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan RUPS	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		<b>2,40</b>
1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan	Hal dimaksud telah dilakukan secara berkala, terakhir dilakukan pada tanggal 24 April 2025 dalam pelaksanaan RUPS Tahunan BPR	2

*PT BPR NEHEMIA*

	tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	NEHEMIA	
2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2
3	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	3
4	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan dimaksud telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara berkala dan tepat waktu	2
5	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Anggota Dewan Komisaris, terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dalam rangka peningkatan kinerja BPR.	3

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	Pemenuhan Struktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Proses tata Kelola Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Secara umum Hasil Tata Kelola Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

**D. Faktor 4 (Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite)**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2,00
1	BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak membentuk Komite Direksi hanya membentuk Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal Inti di bawah Rp. 50 M yang sesuai POJK.	2
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, Karena Direksi tidak membentuk Komite	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,00
1	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK.	2
2	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Audit disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komsaris.	2
3	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite pemantau Risiko dilaksanakan oleh anggota Dewan Komsaris.	2
4	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK, sehingga tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan oleh anggota Dewan Komsaris.	2
5	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK.	2
6	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPR tidak membentuk Komite Manajemen Risiko dan Komite Dewan Komisaris disebabkan modal inti di bawah Rp. 50 M sesuai POJK. Sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib Komite	2

<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,00
1	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Komite Kredit selalu menerima masukan dari Fungsi Kepatuhan sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Maksimum Pemberian Kredit.	2
2	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab Modal Inti BPR di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi	2
3	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak membentuk Komite.	2

<b>No</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	BPR tidak membentuk Komite sebab Modal Inti dibawah Rp. 50 M.
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	BPR tidak membentuk Komite sebab Modal Inti dibawah Rp. 50 M.
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	BPR tidak membentuk Komite sebab Modal Inti dibawah Rp. 50 M.
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

### E. Faktor 5 (Penanganan Benturan Kepentingan)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2,00
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan, yang mana hal-hal dimaksud telah diatur didalamnya.	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,00
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Hal dimaksud telah diatur dalam SOP Benturan Kepentingan, Bab. IV angka (6) yang menyatakan bahwa "Jika terjadi benturan kepentingan maka karyawan yang bersangkutan dilarang mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap putusan."	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,00
1	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, seandainya pun terjadi benturan maka keputusan yang diambil mengacu pada SOP benturan kepentingan.	2
2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Hal dimaksud telah diatur dalam SOP Benturan Kepentingan, Bab. IV angka (7) yang menyatakan bahwa "Pengungkapan benturan kepentingan tersebut diatas harus dituangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama baik yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan."	2
3	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Penanganan benturan kepentingan mengacu pada SOP BPR.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Penangan Benturan kepentingan telah di tuangkan dalam Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Secara umum Hasil tata Kelola telah dilaksanakan sesuai POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

## F. Faktor 6 (Penerapan Fungsi Kepatuhan)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		3,50
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penunjukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2
2	BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	4
3	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	4
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	4
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,67
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun kebijakan (SOP) kepatuhan	2
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Secara bertahap kondisi dimaksud telah dilakukan	2
3	Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	4
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,50
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR belum dapat merealisasikan pemenuhan kekosongan STO diantaranya penunjukan PE.	3
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disampaikan secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri. Sementara tugas dari PE Kepatuhan ditangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun kebijakan untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Laporan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan telah disusun dan dilaporkan kepada OJK
2	Faktor Negatif	Belum terpenuhinya STO yaitu PE Kepatuhan
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

**G. Faktor 7 (Penerapan fungsi Audit Intern)**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		4,00
1	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum menunjuk kembali Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri.	4
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR belum menunjuk Kembali pejabat yang dimaksud, namun pedoman dan tata tertib kerja dikinikan sesuai dengan ketentuan.	4
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pelaksanaan dan Prosedur Fungsi Audit telah di atur dalam SOP BPR, yang mana Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap manajemen mengenai kecukupan, efektifitas pengendalian manajemen pada semua kegiatan yang berlangsung di BPR.	4
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Dalam Struktur Organisasi BPR, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	4
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR belum menunjuk kembali Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri.	4
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		3,00
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Dalam menerapkan fungsi audit intern BPR, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.	3
2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Sesuai dengan ketentuan kondisi dimaksud belum diterapkan di BPR	3
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan dan Prosedur Fungsi Audit telah di atur dalam SOP BPR, yang mana Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap manajemen mengenai kecukupan, efektifitas pengendalian manajemen pada semua kegiatan yang berlangsung di BPR.	3

4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Dalam rangka peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pihak intern maupun ekstern.	3
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,00
1	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Hal dimaksud telah di buat dan dipresentasikan	2
2	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	-
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	-
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern sehingga proses Audit dilaksanakan oleh Dewa Komisaris
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	BPR telah menyampaikan Laporan kepada OJK tentang Pokok hasil Audit
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi Audit Intern sehingga proses Audit dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

**H. Faktor 8 (Penerapan fungsi Audit Ekstern)**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2,00
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan ketentuan.	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,00
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Untuk tahun 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M. Sc. & Rekan dengan Akuntan Publik Mochammad Rivai, SE. AK., CA., CPA.	2
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO dalam Laporan Tahunan 2024 pada tanggal 06 Mei 2025.	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,00
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR oleh KAP	2
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Pelaksanaan Audit laporan keuangan BPR dilakukan oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Hasil audit telah dilaporkan kepada OJK
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

## I. Faktor 9 (Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk pengendalian Intern)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		3,00
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum menunjuk kembali PE Manajemen Risiko setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri, namun BPR telah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi APU PPT.	3
2	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki SOP Manajemen Risiko yang mana didalamnya mencakup Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3
3	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, diatur dalam SOP Manajemen Risiko	3
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,64
1	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum menunjuk kembali PE Manajemen Risiko setelah pejabat dimaksud mengundurkan diri, namun BPR telah menunjuk PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi APU PPT.	3
2	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3
3	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas hal-hal dimaksud sesuai dengan kewenangannya.	3

	evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme		
4	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	2
5	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap	3
6	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Upaya BPR dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan.	2
7	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Upaya BPR dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan.	2
8	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap	3
9	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Upaya BPR dalam penerapannya dilakukan secara bertahap	3
10	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Sistem informasi yang dimiliki BPR masih dalam pengembangan dan penyempurnaan.	3
11	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip manajemen risiko, yang dilakukan baik secara formal melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko untuk peningkatan kompetensi SDM, atau informal berupa arahan-arahan Direksi.	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		<b>2,00</b>
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui Aplikasi Pelaporan APOLO, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memiliki produk dan aktivitas baru	2
3	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui Aplikasi Pelaporan APOLO, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	-
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE Manajemen Risiko
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	-
2	Faktor Negatif	BPR belum menunjuk PE Manajemen Risiko
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	BPR telah Menyusun Laporan Profil Risiko
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	3

**J. Faktor 10 (Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR)**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2,00
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,00
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pengkinian dimaksud telah dilakukan pada tanggal 27 September 2024.	2
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,00
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sampai dengan akhir Semester 2 tahun 2025 tidak terdapat pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK.	2
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sampai dengan akhir Semester 2 tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas.	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan terkait BMPK
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Proses pemberian kredit selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Sampai dengan masa Laporan tidak ada Pelanggaran maupun Pelampauan BMPK
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

**K. Faktor 11 (Integritas pelaporan dan sistem teknologi Informasi)**

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2,67
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sistem Informasi Manajemen BPR masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan	3
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Sistem Informasi Manajemen BPR masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan	3
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2,17
1	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Hal dimaksud belum sepenuhnya dilakukan.	3
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK melalui aplikasi Pelaporan APOLO	2
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan OJK	2
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK	2
6	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK	Laporan dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan OJK	2

*PT BPR NEHEMIA*

	yang dilakukan secara dengan sengaja		
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		<b>2</b>
1	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Hal dimaksud tidak pernah dilakukan BPR.	2
2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK	2
3	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan dimaksud telah dilakukan dan disampaikan kepada OJK melalui aplikasi SIPEDELI	2

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	-
2	Faktor Negatif	Sistem Informasi Manajemen masih perlu adanya perbaikan
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Penyusunan Laporan telah sesuai dengan POJK
2	Faktor Negatif	-
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	
1	Faktor Positif	Secara umum Hasil Tata Kelola Integritas Pelaporan Keuangan Cukup baik
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	<b>2</b>

## L. Faktor 12 (Rencana Bisnis BPR)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	Skala Penerapan
<b>A</b>	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		2
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	RBB BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	2
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Pemegang Saham mendukung atas RBB BPR	2
<b>B</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		2
1	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.	2
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. sesuai dengan kewenangannya.	2
<b>C</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		2,5
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan RBB BPR telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2
2	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	BPR belum dapat mencapai target yang telah direncanakan.	3

No	Kesimpulan	Keterangan
<b>A</b>	<b>Struktur (S)</b>	
1	Faktor Positif	RBB disusun oleh Direksi sesuai dengan Visi Misi BPR
2	Faktor Negatif	-
<b>B</b>	<b>Proses (P)</b>	
1	Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
2	Faktor Negatif	RBB tahun sebelumnya yang menjadi acuan RBB tahun berikutnya belum sepenuhnya tercapai.
<b>C</b>	<b>Hasil (H)</b>	

1	Faktor Positif	RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
2	Faktor Negatif	-
<b>D</b>	<b>Nilai Faktor</b>	2

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2
Predikat Komposit	<b>BAIK</b>												

**Kesimpulan**

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen BPR.

**Faktor Positif**

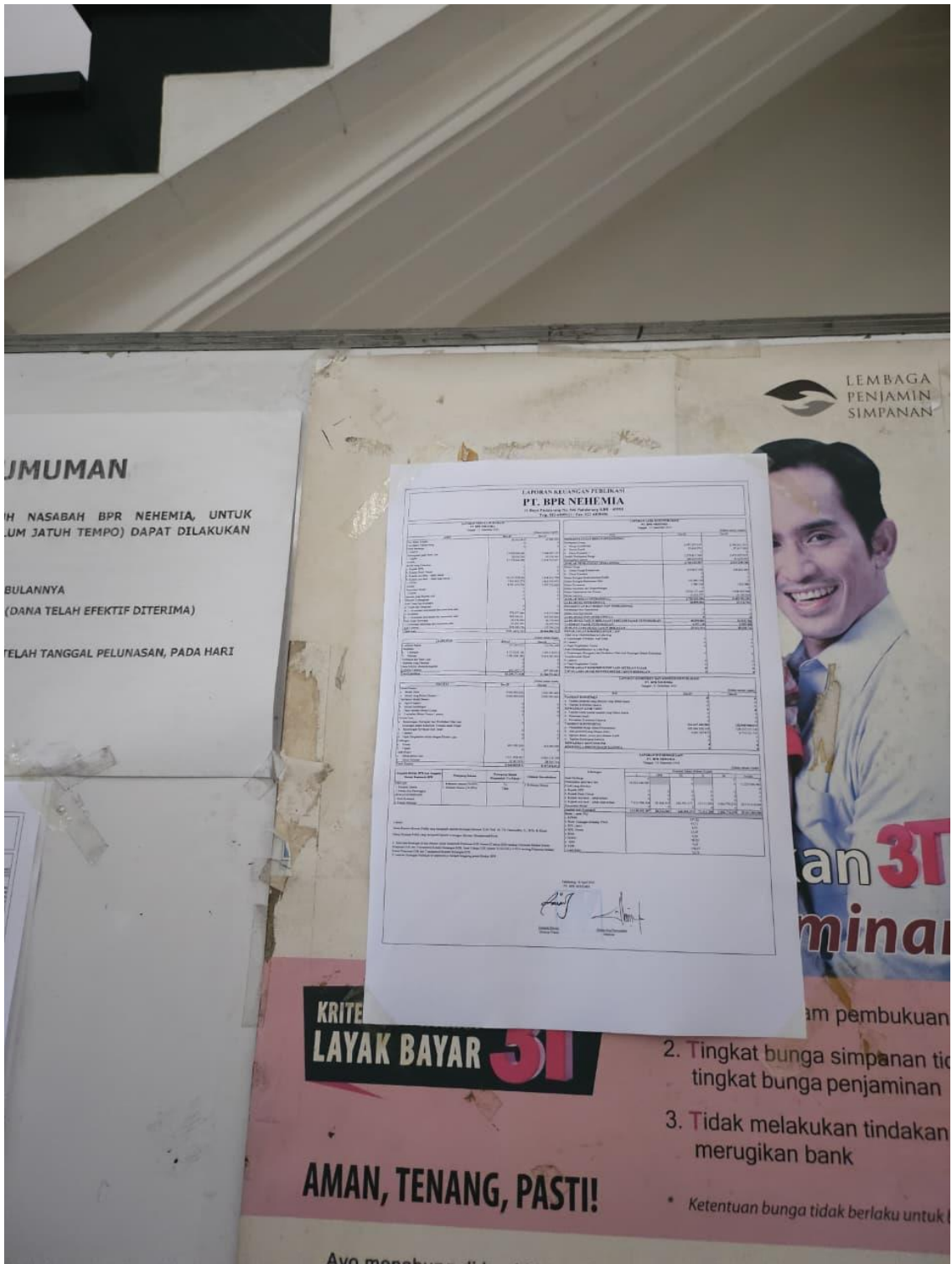
- Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan & pelaksanaan tata kelola memadai.
- Direksi & Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai,serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.
- Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.
- Tidak ada pemberian kredit kepada pihak terkait, dan tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK.
- BPR telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan system teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
- Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

**Faktor Negatif**

- Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.
- Belum menunjuk Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Dewan Komsaris
- BPR belum memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, anti fraud, namun Pejabat eksekutif program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

L A P O R A N  
**Keuangan Publikasi**  
**TAHUN 2025**  
**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**Nehemia**

Laporan Publikasi Pada papan Pengumuman







Demikian Laporan Tahunan 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja dan pencapaian BPR selama tahun berjalan. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedepan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, serta pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

**Hormat Kami,**

**PT. BPR NEHEMIA**



**Edrianto Sitorus**

**Direktur Utama**



**Nimas Ayu Pamungkas**

**Direktur YMF Kepatuhan**

**Mengetahui**



**Rosi Rostianti**

**Komisaris Utama**



**Pahala Silitonga**

**Komisaris**